



LKIP TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



Sukses Jakarta untuk Indonesia

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2024



JAKARTA BARAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2024 dapat disusun tepat waktu. LKIP disusun sebagai wujud tanggung jawab Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

LKIP berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2024 tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. LKIP Kota Administrasi Jakarta Barat diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara akurat, relevan, transparan, dan akuntabel.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan, maupun bentuk kontribusi lainnya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat Jakarta Barat.

Jakarta, 30 Januari 2025

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Uus Kuswanto

NIP 197301211993031004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai perangkat daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bertugas melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sesuai pelimpahan dari Gubernur. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh warga. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 disusun untuk menggambarkan capaian kinerja, prestasi, dan hal yang memerlukan perbaikan.

Pada tahun 2024, capaian kinerja strategis Kota Administrasi Jakarta Barat mencapai 100% pada setiap indikator, berkat peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menindaklanjuti aduan masyarakat, merealisasikan target tepat waktu, dan melakukan revaluasi triwulanan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Barat juga berhasil meraih berbagai penghargaan di tingkat provinsi dan nasional.

Pada tahun 2024, alokasi anggaran sebesar Rp 1.027.669.539.382 dengan realisasi Rp 995.428.959.493, mencatat efisiensi anggaran sebesar 58,13%. Meskipun capaian kinerja strategis memuaskan, nilai budaya kerja seperti kesungguhan, komitmen, inovasi, dan koordinasi perlu terus ditingkatkan demi keselarasan tugas dan fungsi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Grafik	ix
Bab 1 : Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Tujuan dan Manfaat	2
Dasar Hukum	2
Gambaran Umum Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat	4
Kedudukan Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat.....	7
Tugas dan Fungsi Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat	7
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat	13
Aspek Strategis Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat	18
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Internal	22
Sistematika Penulisan	24
 Bab 2 : Perencanaan Kinerja Tahun 2024.....	 26
Rencana Strategis.....	26
Pernyataan Visi.....	27
Indikator Kinerja Utama (IKU)	29
Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	32
Alokasi Anggaran Tahun 2024	38
 Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja	 41
Capaian Indikator Kinerja	43

Capaian Kegiatan Strategis Daerah.....	74
Capaian Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional	78
Analisis Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024.....	87
Perbandingan Capaian Kinerja	97
Realisasi Anggaran Tahun 2024	99
Prestasi dan Inovasi	106
 Bab 4 : Penutup	 108
Kesimpulan	108
Saran	109

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Prestasi dan Penghargaan
3. Inovasi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persebaran dan Kepadatan Penduduk.....	5
Tabel 2. Data Penduduk Menurut Agama.....	6
Tabel 3. SKPD/UKPD Kota Administrasi Jakarta Barat.....	14
Tabel 4. Pegawai Kota Administrasi Jakarta Barat Menurut Jenjang Jabatan dan Unit Kerja .	15
Tabel 5. Kesesuaian Pendidikan, Diklatpim dan Pangkat Pejabat Struktural	17
Tabel 6. Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung	17
Tabel 7. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023	22
Tabel 8. Tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja RPD terkait Tujuan Renstra Tahun 2023-2026	29
Tabel 9. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2023-2026	30
Tabel 10. Keterkaitan Indikator Sasaran dengan Program dan Indikator Kinerja Program	31
Tabel 11. Target Kinerja Sasaran Strategis sesuai Lampiran Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024	33
Tabel 12. Rencana Aksi IKU Walikota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024	34
Tabel 13. Target Kinerja KSD Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024.....	35
Tabel 14. Target Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024.....	36
Tabel 15. Program dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024	38
Tabel 16. Interpretasi Kategori Nilai Capaian Kinerja	43
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Utama	44
Tabel 18. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	45
Tabel 19. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan.....	45
Tabel 20. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi.....	46
Tabel 21. Capaian Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Program	48
Tabel 22. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program	49
Tabel 23. Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	50
Tabel 24. Interpretasi Capaian Kinerja Tahun 2024.....	52

Tabel 25. Jadwal Pelaksanaan SKM Tahun 2024	58
Tabel 26. Klasifikasi Nilai Persepsi	60
Tabel 27. Nilai SKM Pada Kecamatan Kota Adm Jakarta Barat Semester I Tahun 2024	61
Tabel 28. Nilai SKM Pada Kecamatan Kota Adm Jakarta Barat Semester II Tahun 2024	61
Tabel 29. Jadwal Pelaksanaan Survei Efektivitas Koordinasi Tahun 2024	67
Tabel 30. Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Tahun 2024.....	68
Tabel 31. Capaian Rencana Aksi IKU Walikota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024.....	73
Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja KSD tahun 2024	75
Tabel 33. Perbandingan Target dan Realisasi KSD Tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 ..	77
Tabel 34. Indikator Khusus Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Barat	79
Tabel 35. Perbandingan Indikator Khusus Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024	81
Tabel 36. Indikator Operasional Tahun 2024 Kota Adm Jakarta Barat	83
Tabel 37. Perbandingan Indikator Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024..	84
Tabel 38. Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024	88
Tabel 39. Tabel Analisis Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024	94
Tabel 40. Perhitungan Efisiensi Rincian Output (RO) dan Nilai Efisiensi	96
Tabel 41. Perbandingan Nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024.....	98
Tabel 42. Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Barat	99
Tabel 43. Realisasi Anggaran pada PD/UKPD Tahun 2024	100
Tabel 44. Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2019 – Tahun 2024	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat	4
Gambar 2. Bagan Susunan Organisasi	13

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Grafik 2. Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	50



BAB

1

Pendahuluan

Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan daerah saat ini lebih dituntut pada prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dengan mewujudkan *good governance* melalui peningkatan kinerja aparat negara akan menghasilkan kinerja pelayanan publik yang optimal. *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan *public goods and services* dengan praktek terbaik.

Agar *good governance* dapat diwujudkan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. *Good governance* menuntut koordinasi yang baik dan profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Instansi Pemerintah memiliki tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik/*stakeholders*) Jakarta Barat. Secara periodik pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan hasil atas kinerja yang telah dilaksanakannya selama satu tahun anggaran.

Tujuan dan Manfaat

Laporan Kinerja disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja diharapkan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 selain mengacu kepada peraturan perundang undangan baik dari tingkat pusat maupun tingkat provinsi, juga mengacu kepada Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023.

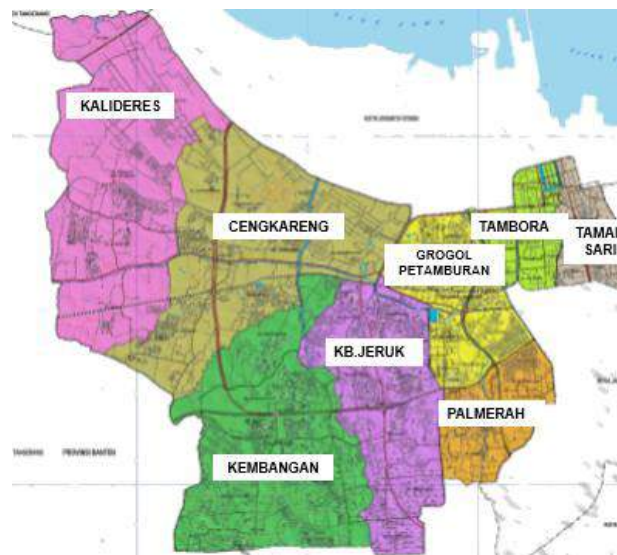
Gambaran Umum

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat

Jakarta Barat terdiri dari 8 Kecamatan, 56 Kelurahan, 578 Rukun Warga, 6.348 Rukun Tetangga dengan penduduk 2.589.589 jiwa yang menempati areal seluas 12.615,44 ha.

Kepadatan penduduk rata-rata di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat adalah 19.993 jiwa/Km² yang tersebar secara tidak merata dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tambora dengan kepadatan sebesar 44.794 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kembangan dengan kepadatan penduduk sebesar 13.829 jiwa/km². Keadaan wilayah pada umumnya beriklim panas dengan suhu udara berkisar 23,2 sampai dengan 36,8 derajat Celcius.

Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut. Peta wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat

Persebaran Penduduk

Persebaran dan kepadatan penduduk di Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai data yang terdapat pada Kota Administrasi Jakarta Barat Dalam Angka 2024 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk Per Km2	Jumlah Penduduk		
			Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Kembangan	12.972	157.856	157.846	315.702
2	Kebon Jeruk	20.502	185.020	185.262	370.282
3	Palmerah	31.287	117.847	115.939	233.786
4	Grogol Petamburan	23.900	117.314	120.053	237.367
5	Tambora	49.972	135.826	132.051	267.877
6	Taman Sari	16.537	63.129	63.607	126.736
7	Cengkareng	22.234	299.073	292.675	591.748
8	Kalideres	15.631	236.055	231.962	468.017
Jumlah		20.160	1.312.120	1.299.395	2.611.515

Sumber : Kota Jakarta Barat Dalam Angka 2024

Perekonomian

Sebagai Ibukota Negara RI dan pusat pemerintahan dan perekonomian, Jakarta sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian nasional. Selain itu, sebagai kota yang terbuka, perekonomian Kota Jakarta tidak terkecuali Kota Administrasi Jakarta Barat juga dipengaruhi oleh kondisi dan dinamika perekonomian internasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat, laju pertumbuhan ekonomi mulai bangkit pada tahun 2022 sejak semakin teratasinya pandemi COVID-19. Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi sebesar +5,30 persen.

Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi perekonomian Jakarta khususnya Jakarta Barat adalah jumlah penduduk, pengembangan infrastruktur kota yang meliputi penataan kawasan dan pemukiman, kebijakan pemerintah daerah, dan iklim ketentraman dan ketertiban yang kondusif yang sangat mempengaruhi iklim berusaha, kelancaran aktivitas ekonomi, dan kepariwisataan.

Sosial Budaya

Tantangan yang muncul di bidang sosial adalah pemenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang mudah mengakses dan diakses masyarakat serta bertambahnya jumlah penduduk dan pengangguran. Adapun data jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Data Penduduk Menurut Agama

No.	Kecamatan	Pemeluk Agama					
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Kembangan	251.100	32.022	24.444	612	7.466	58
2	Kebon Jeruk	295.661	34.355	25.254	471	14.365	176
3	Palmerah	208.677	13.879	7.980	559	2.657	34
4	Grogol Petamburan	135.199	38.534	26.539	302	36.590	203
5	Tambora	163.801	32.205	12.563	61	59.035	212
6	Taman Sari	75.202	20.694	10.449	75	20.273	43
7	Cengkareng	474.237	59.522	24.098	453	33.279	159
8	Kalideres	375.042	44.955	19.948	234	27.694	144
Jumlah		1.978.919	276.166	151.275	2.767	201.359	1.029

Sumber : Kota Jakarta Barat Dalam Angka 2024

Kedudukan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat

Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang ada pada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kedudukan Kota Administrasi sebagai perangkat daerah diatur dalam Lampiran XXXVII Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut :

1. Kota Administrasi berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
2. Walikota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat

Secara umum Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;

- b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- j. Pengoordinasian, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
- k. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- l. Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
- m. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi

pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;

- n. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
- o. Pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
- p. Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi;
- q. Pelaksanaan kesekretariatan Kota Administrasi
- r. Fasilitasi pengkoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
- s. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
- t. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kota Administrasi Jakarta Barat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

Sebagaimana diatur dalam Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan organisasi struktural Kota Administrasi Jakarta Barat terdiri dari :

- a. Sekretariat Kota, terdiri atas :
 1. Asisten Pemerintahan, terdiri atas :
 - a) Bagian Pemerintahan, terdiri atas
 - 1) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Bagian Hukum;
 - c) Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
 - a) Bagian Perekonomian; dan
 - b) Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
 3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - 3) Subbagian Protokol.
 - b) Bagian Keuangan, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Perbendaharaan.
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat.

- b. Kecamatan, terdiri atas :
 - 1. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Program dan Anggaran; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 - 2. Seksi Pemerintahan;
 - 3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - 4. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
 - 5. Kelurahan, terdiri atas :
 - a) Sekretariat Kelurahan;
 - b) Seksi Pemerintahan;
 - c) Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - d) Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

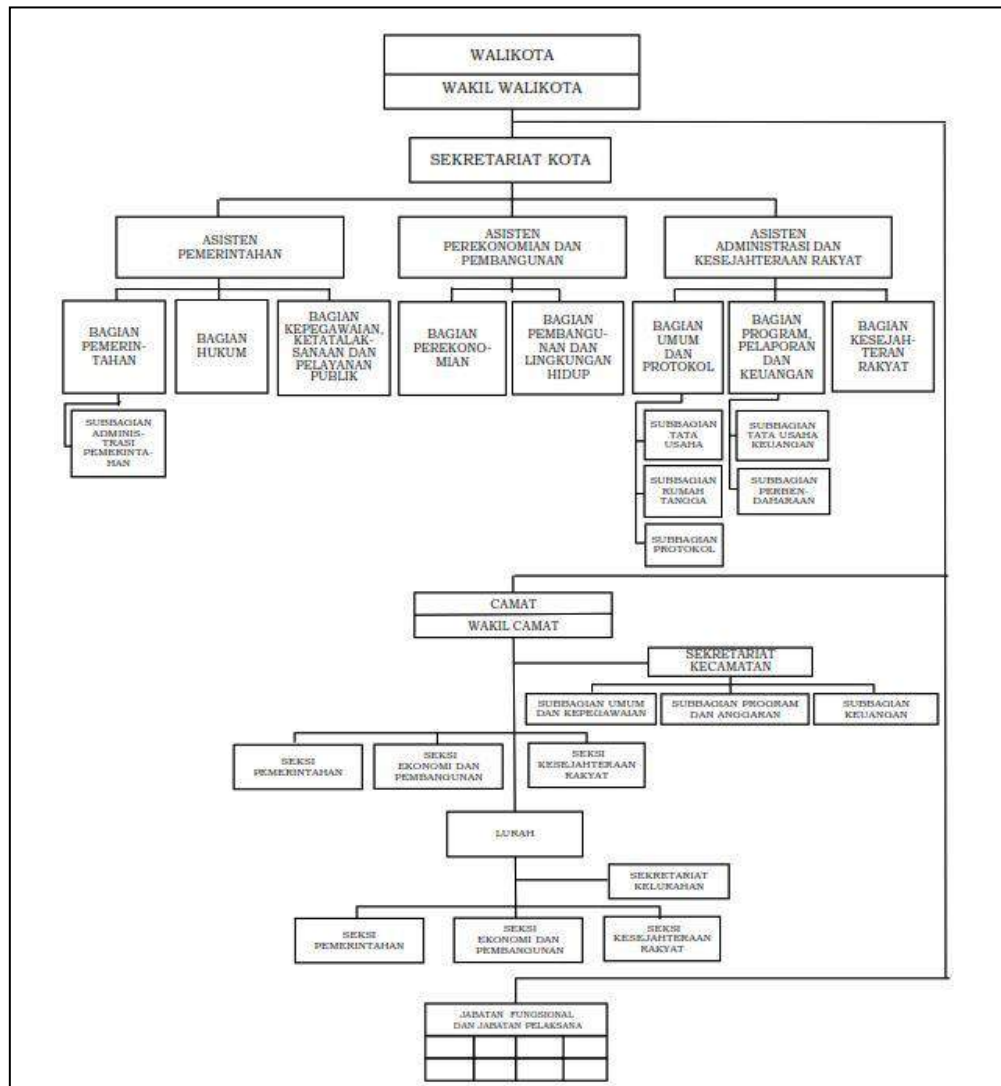
Pada Bagian di Sekretariat Kota Administrasi dibentuk Subkelompok, yaitu unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, antara lain :

- a. Subkelompok Bina Pemerintahan;
- b. Subkelompok Tata Praja; dan
- c. Subkelompok Pelayanan Hukum;
- d. Subkelompok Bantuan Hukum;
- e. Subkelompok Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. Subkelompok Kepegawaian;

- g. Subkelompok Ketatalaksanaan;
- h. Subkelompok Pelayanan Publik;
- i. Subkelompok Pariwisata, Pangan, Kelautan, dan Pertanian;
- j. Subkelompok Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- k. Subkelompok Perhubungan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi;
- l. Subkelompok Pekerjaan Umum;
- m. Subkelompok Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan;
- n. Subkelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau;
- o. Subkelompok Program dan Pelaporan;
- p. Subkelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
- q. Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan, dan Mental Spiritual;
dan
- r. Subkelompok Kesehatan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk.

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat

Susunan organisasi tersebut dalam Lampiran XXXVII Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :



Gambar 2. Bagan Susunan Organisasi

Adapun UKPD di tingkat Kota Administrasi, yang berkaitan dengan fungsi Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh Kota Administrasi, terdiri atas :

- a. Inspektorat Pembantu Kota Administrasi;
- b. Suku Dinas;
- c. Suku Badan;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi; dan
- e. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi.

Tabel 3. SKPD/UKPD Kota Administrasi Jakarta Barat

NO	INSTANSI	PIMPINAN SKPD
1	Asisten Pemerintahan	Firmanudin
2	Asisten Administrasi dan Kesra	RM. Amien Haji
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Imron
4	Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat	Rano Rahmat Efendi
5	Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat	Hilmy Rosyida
6	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat	Budiono Santoso
7	Bagian PLH Setko Adm. Jakarta Barat	Sefri Dwipayuda
8	Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Barat	Abdurrahman Anwar
9	Bagian Keuangan Setko Adm. Jakarta Barat	Saigor P. Gultom
10	Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. Jakarta Barat	Mera Nuringsih
11	Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat	Febriandrri Suharto
12	Inspektur Pembantu Wilayah Kota	Dzikran Kurniawan
13	Kepala Satpol PP Jakarta Barat	Agus Irwanto
14	Suku Badan Kesatuan Bangsa & Politik	M. Matsani
15	Suku Badan Kepegawaian Kota	Moh. Hafiz
16	Suku Badan Pendapatan Daerah	Rusdian Permana
17	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota	Agus Sanyoto
18	Suku Badan Pengelola Aset Daerah	Sigit Gunawan
19	Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah	Tri Astuti
20	Unit Pengelola Barang & Jasa	Aulia
21	Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	Gentina Arifin
22	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Adm. Jakarta Barat	Putut Jan Toko
23	Suku Dinas Kominfo, Informatika dan Statistik	Andrie Yuswanto

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024

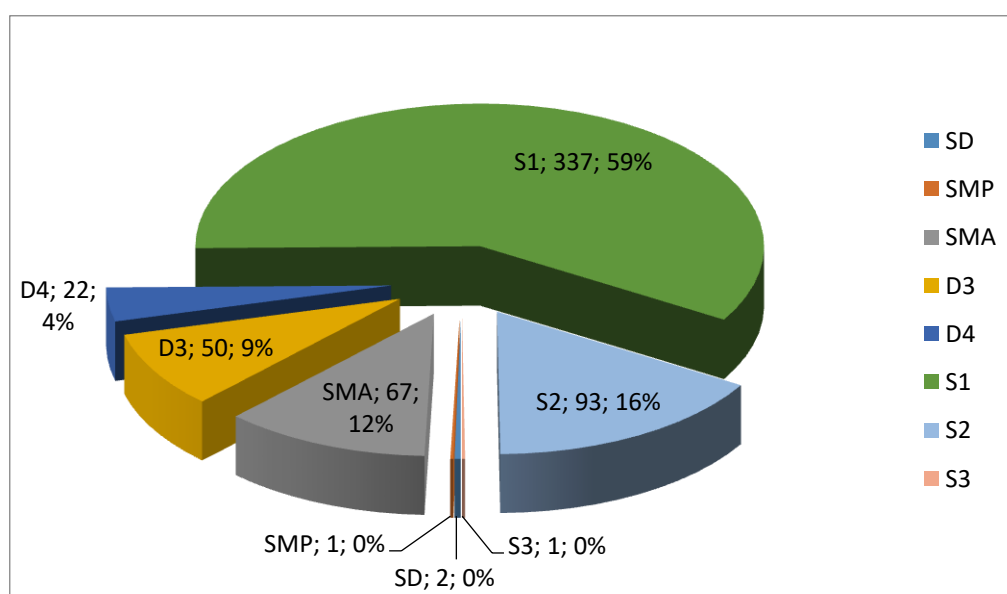
NO	INSTANSI	PIMPINAN SKPD
24	Suku Dinas Perhubungan	Christianto
25	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Jackson Dianrus S
26	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Adm. Jakarta Barat	Dedi Sumardi
27	Suku Dinas Bina Marga	Darwin Ali
28	Suku Dinas Sumber Daya Air	Purwanti Suryandari
29	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Agus Ruhiyat
30	Suku Dinas Lingkungan Hidup	Achmad Hariadi
31	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang & Pertanahan	Heru Sunawan
32	Suku Dinas Sosial	Suprpto
33	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I	Diding Wahyudin
34	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II	Budiyono
35	Suku Dinas Kesehatan	Erizon Safari
36	Suku Dinas Pemuda & Olah Raga	Eko Pudjihariyanto
37	Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Noer Subchan
38	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Romy Sidharta
39	Suku Dinas Perpustakaan & Arsip	Achmad Jazuri
40	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Iqbal Idham Ramid
41	Suku Dinas Kebudayaan	Sri Kusumawati
42	Unit Pelaksana PMPTSP	Aziz Kurniawan S.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kota Administrasi Jakarta Barat didukung oleh 573 pegawai yang tersebar ke dalam tingkat Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Komposisi pegawai berdasarkan jenjang jabatan dan unit kerja sebagai berikut :

Tabel 4. Pegawai Kota Administrasi Jakarta Barat Menurut Jenjang Jabatan dan Unit Kerja

NO	JABATAN	SETKO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH
1	Pimpinan Tinggi Pratama	3	0	0	3
2	Administrator	11	23	0	34
3	Pengawas	6	43	262	311
4	Subkelompok	17	0	0	17
5	Fungsional	2	0	0	2
6	Pelaksana	63	23	120	216
	TOTAL	102	89	382	573

Dalam rangka peningkatan kinerja, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Administrasi Jakarta Barat terutama bagi para pegawai yang dipercaya untuk menduduki jabatan struktural. Penyesuaian tingkat pendidikan para pejabat struktural pada jenjang pengawas dan administrator telah dilakukan pengisian jabatan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara, di mana salah satu persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pengawas adalah memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3. Kualifikasi pendidikan pegawai Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai data pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Grafik 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi pejabat struktural tidak hanya dari segi pendidikan formal mengingat masih terdapat pejabat struktural yang belum memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5. Kesesuaian Pendidikan, Diklatpim dan Pangkat Pejabat Struktural

NO	KELOMPOK JABATAN	JUMLAH JABATAN	KESESUAIAN		
			PENDIDIKAN	DIKLATPIM/ DIKLAT FUNGSIONAL	PANGKAT
1	PIMPINAN TINGGI PRATAMA	3	3	1	3
2	ADMINISTRATOR	34	34	26	34
3	PENGAWAS	311	300	119	310
4	SUBKELOMPOK	17	17	10	18
TOTAL		365	354	156	364

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kota Administrasi Jakarta Barat didukung dengan sarana dan prasarana, di antaranya :

Tabel 6. Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung

NO	JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	Kendaraan Roda Dua	1	Unit	Baik
2	Kendaraan Roda Empat	21	Unit	Baik
3	Laptop	20	Unit	Baik
4	P.C	56	Unit	Baik
5	Printer	36	Unit	Baik
6	Infocus	19	Unit	Baik
7	AC	20	Unit	Baik
8	CCTV	5	Set	Baik
9	Fingerprint	12	Unit	Baik
10	Scanner	15	Unit	Baik
11	Rak Besi	23	Unit	Baik
12	Dispencer	2	Unit	Baik
13	Meja Kerja	140	Unit	Baik
14	Kursi Kerja	309	Unit	Baik
15	Lemari Arsip	9	Unit	Baik
16	Elevator /Lift	12	Unit	Baik
17	Gedung Kantor	2	Unit	Baik

Aspek Strategis

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat

Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Barat, telaahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, dan dokumen perencanaan pembangunan nasional serta rencana tata ruang, telah dirumuskan beberapa isu-isu strategis yang berkaitan dengan Kota Administrasi Jakarta Barat. Rumusan isu-isu strategis dimaksud, antara lain:

1. Urbanisasi yang Cepat

Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan salah satu wilayah yang padat penduduk dan terus mengalami peningkatan jumlah penduduk akibat urbanisasi. Urbanisasi cepat ini menyebabkan tekanan pada infrastruktur dasar, seperti transportasi, air bersih, listrik, dan sanitasi. Pemanfaatan lahan di Jakarta Barat didominasi oleh permukiman, kawasan industri, dan perdagangan. Diperlukan pengelolaan ruang kota yang lebih baik, termasuk penambahan ruang terbuka hijau, pengembangan permukiman vertikal yang layak huni, dan pengendalian zonasi wilayah.

2. Kemacetan Lalu Lintas dan Polusi Udara

Kemacetan mengakibatkan polusi udara dari kendaraan bermotor dan kawasan industri di wilayah Jakarta Barat cukup signifikan. Pengembangan transportasi umum seperti Jaklingko, TransJakarta, dan jalur sepeda perlu diprioritaskan dalam pengembangan transportasi berkelanjutan. Di samping itu, integrasi antar moda

transportasi sangat penting untuk mendukung mobilitas warga dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

3. Kerentanan Banjir

Jakarta Barat sering mengalami banjir akibat curah hujan tinggi, drainase yang tidak memadai, serta penurunan muka tanah di beberapa wilayah seperti Cengkareng dan Kalideres. Wilayah ini juga menjadi lokasi lintasan sungai besar, seperti Kali Pesanggrahan dan Kali Angke yang sering meluap. Revitalisasi waduk seperti Waduk Bojong dan Waduk Rawa Buaya, pembangunan tanggul banjir, dan optimalisasi sistem drainase kota. Normalisasi sungai juga harus diperkuat untuk mengurangi dampak banjir.

4. Ketimpangan Ekonomi

Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar menjadi prioritas. Penguatan sektor UMKM melalui program pelatihan, digitalisasi pemasaran, dan pembukaan pusat pelatihan bisnis lokal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Transformasi Digital

Digitalisasi layanan publik, seperti pendaftaran layanan kesehatan dan administrasi melalui aplikasi merupakan langkah dalam transformasi digital selain itu, edukasi literasi digital di masyarakat perlu ditingkatkan untuk memanfaatkan peluang teknologi yang lebih luas.

6. Pemulihan Ekonomi Pasca-COVID-19

Pemberian insentif usaha, pelatihan keterampilan baru, dan peningkatan akses pembiayaan dapat serta pengembangan destinasi wisata dan kawasan kreatif juga dapat membuka peluang kerja baru.

7. Pengelolaan Lingkungan dan RTH

Peningkatan jumlah taman kota dan revitalisasi taman-taman lama, seperti Taman Cattleya dan Taman Anggrek, untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Administrasi Jakarta Barat. Program penghijauan di kawasan permukiman padat dan lahan kosong meningkatkan daya dukung lingkungan dan mengurangi suhu panas kota.

8. Tantangan Perubahan Iklim

Strategi adaptasi yang mencakup edukasi masyarakat, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menjadi isu dalam menghadapi perubahan iklim untuk wilayah Jakarta Barat.

9. Pengelolaan Sampah dan Limbah

Pengelolaan sampah di Jakarta Barat menjadi tantangan besar, terutama di kawasan permukiman padat dan pasar-pasar tradisional. Volume sampah yang tinggi sering kali melebihi kapasitas pengangkutan dan pengolahan. Penerapan sistem daur ulang, bank sampah, dan pengelolaan berbasis teknologi di tingkat masyarakat perlu diperkuat untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA).

10. Isu belum cukup cepatnya waktu respon Camat dan Lurah saat terjadinya bencana/masalah sosial.

Hal ini terkait dengan masih rendahnya tingkat pemanfaatan Rumah Dinas Camat dan Lurah sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan data, dari 8 Kecamatan dan 56 Kelurahan, terdapat 4 (empat) Kecamatan dan 15 (lima belas) Kelurahan tidak memiliki rumah dinas. Sementara dari 45 (empat puluh lima) Rumah Dinas Camat dan Lurah yang ada, sebanyak 25 (dua puluh lima) Rumah Dinas tidak ditempati oleh Camat dan Lurah (55,5%). Hal ini terjadi karena Rumah Dinas Camat dan Lurah umumnya dalam kondisi rusak berat maupun ringan yang disebabkan kondisi bangunan yang sudah tua. Rendahnya tingkat pemanfaatan Rumah Dinas oleh Camat dan Lurah dapat memengaruhi tingkat respon Camat dan Lurah dalam menangani permasalahan kewilayahan terutama di luar jam kedinasan.

Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki tantangan strategis yang kompleks akibat urbanisasi, kemacetan, kerentanan banjir, dan kesenjangan ekonomi. Dengan langkah-langkah strategis yang terintegrasi, seperti penguatan infrastruktur, pengelolaan lingkungan yang lebih baik, serta pemberdayaan masyarakat melalui inovasi teknologi dan ekonomi lokal, Jakarta Barat dapat berkembang menjadi wilayah yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Internal

Kota Administrasi Jakarta Barat telah menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan Surat Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5092/PA.02.02 tentang Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023, tindak lanjut hasil tersebut, antara lain :

Tabel 7. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP
Perencanaan Kinerja		
1.	Menyusun Perencanaan Kinerja (perkin, renstra, IKU dan renja) yang baik dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelerasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	Walikota Administrasi Jakarta Barat telah menindaklanjuti dengan menyusun perencanaan kinerja dengan membuat Matriks Cascading dan Penyusunan Pohon Kinerja 2023. Penyelerasan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) disesuaikan dalam mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dan capaian target pada level tujuan dan sasaran di Lingkup Kota Administrasi Jakarta Barat. Hal ini dapat terlihat pada dokumen : 1. Surat Walikota Jakarta Barat no.568/OT.05.01 tentang Penyampaian Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Esl.II,III dan IV) Kota Administrasi JB Tahun 2024 2. Dokumen Pohon Kinerja 2023-2026.
	Menyusun dokumen Perencanaan Kinerja yang berkesinambungan, selaras antara hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan	Walikota Administrasi Jakarta Barat telah menindaklanjuti dengan dilakukan dialog komunikasi antara pimpinan dan bawahan untuk penyelerasan kinerja. Dialog Kinerja pada dilakukan secara berkelanjutan dan direncanakan sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja individu dan organisasi di Lingkup Walikota Administrasi Jakarta Barat. Hal ini dapat terlihat pada dokumen : 1. Dokumen Rapat Penyusunan Perkin 2. Dialog Kinerja Eselon III dan IV dan Pelaksana
Pengukuran Kinerja		
2.	Melakukan Pengukuran Kinerja secara berjenjang dan berkala apakah telah sesuai capaian kinerja yang diharapkan untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien dengan melampirkan bukti evaluasi perkin tiap TW dan melampirkan screenshot bukti validasi renkin di sistem e-TPP disetiap jenjang (eselon II, III, IV dan staf) pegawai yang tidak masuk kerja	Walikota Administrasi Jakarta Barat telah menindaklanjuti dengan melakukan pengukuran Rencana kinerja di sistem e-TPP pada setiap jenjang (eselon II,III,IV dan staf) di Lingkup Walikota Administrasi Jakarta Barat dan telah divalidasi sesuai realisasi pada masing-masing pegawai. Realisasi yang tidak tercapai dan telah tervalidasi maka akan berdampak pada capaian kinerja tidak mencapai 100%. Hal ini dapat terlihat pada dokumen : 1. Perkin Walikota 2. Perkin Wakil Walikota 3. Perkin Sekretaris Kota 4. Renkin Kabag 5. Renkin Subkel 6. Screenshot Validasi renkin sistem e-TPP Eselon III-IV dan Staf
	Melakukan pengukuran kinerja secara berkala (melampirkan evaluasi perkin eselon 2 s.d staf), dijadikan dasar pemberian reward dan punishment serta menjadi dasar dalam (penempatan/penghapusan jabatan) jabatan baik struktural maupun fungsional	Walikota Administrasi Jakarta Barat telah menindaklanjuti dengan melakukan pengukuran kinerja, membandingkan target, realisasi, capaian, dan penanggung jawab pada setiap Indikator di Lingkup Walikota Administrasi Jakarta Barat. Dalam mendukung capaian kinerja berkelanjutan dilakukan evaluasi penyusunan dan monev SOP. Terkait dengan Hukuman Disiplin pada Tahun 2023 tidak ada yang terkena

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP
	dengan melampirkan screenshot pemotongan dari sistem e- TPP bagi pegawai yang tidak masuk kerja.	hukuman disiplin keterlambatan dan pulang cepat, karena berdasarkan PP 94 Tahun 2021 tidak ada pasal yang menyebutkan untuk akumulasi keterlambatan dan pulang cepat dijadikan sanksi disiplin. Hal ini dapat terlihat pada dokumen : 1. Nodis Rapat Evaluasi Capaian Kinerja TW I-IV 2023 2. Supervisi Penyusunan SOP 3. Dokumen rapat pembinaan kepegawaian 4. Laporan Evaluasi Kinerja TW I-IV 2023
Pelaporan Kinerja		
3.	Laporan Kinerja agar mencantumkan : a. Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya b. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah c. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/international (<i>Benchmark</i> Kinerja)	Walikota Administrasi Jakarta Barat telah menindaklanjuti dengan telah menyajikan informasi pencapaian kinerja, informasi keberhasilan, kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya pada dokumen LKIP 2023. Analisis capaian kinerja pada tahun 2023 pada halaman 82-88 terkait dengan pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan serta upaya perbaikan/penyempurnaan, dan tabel evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah. Terkait dengan perbandingan capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat, pada tahun 2023 dilakukan perbandingan pada Kota dan Kabupaten. Selain itu indikator kepuasan masyarakat dibandingkan dengan capaian pada level nasional, yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Bandung. Hal ini dapat terlihat pada dokumen : 1. Dokumen pendukung Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan.kegagalan kinerja kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yaitu File PDF Dokumen LAKIP Hal 82-88 2. Dokumen Pendukung Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah yaitu Dokumen LAKIP Hal 83 3. Dokumen Pendukung Analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional yaitu Dokumen LAKIP Hal 83.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
4	Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal : a. Membentuk Tim SAKIP Internal yang ditetapkan dalam bentuk SK/ST dari Kepala Perangkat Daerah dan dilakukan pengumpulan dokumen secara berjenjang b. Agar dilakukan peningkatan pengetahuan para pegawainya terkait implementasi SAKIP	Walikota Administrasi Jakarta Barat telah menindaklanjuti dengan telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0064 Tahun 2023 tentang Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat. Terkait dengan peningkatan kompetensi, telah diusulkan secara bertahap kepada BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dapat terlihat pada dokumen : 1. SK Walikota JB No.e-0064 Tahun 2023 tentang Tim Evaluasi SAKIP 2023 2. ST No. e-0040/kg.04.00 tentang Peserta Pendidikan dan Pelatihan MR Angk III Tahun 2024 3. Surat Usulan Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan MR 2024 No.e-0042/KG.04.00 4. ST No. e-0024/KG.04.00 tentang Peserta Pelatihan Government Transformation Academy (GTA) MR SPBE Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 5. Pengumuman Lolos Verifikasi Tema Pelatihan MRSPBE - Maret Online 2023 6. Nota Dinas No. 338/KG.04.00 tentang Laporan Pelaksanaan Pelatihan Government Transformation Academy (GTA) - Manajemen Resiko SPBE Tahun 2023 7. Sertifikat Pelatihan Government Transformation Academy (GTA) No. 19959691320-6/GTA/BLSDM.Kominfo/2023 kepada Denny Aputra.

Sistematika Penulisan

Bab 1 : Pendahuluan

Latar Belakang

Tujuan dan Manfaat

Dasar Hukum

Gambaran Umum Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat

Kedudukan Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat

Tugas dan Fungsi Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat

Aspek Strategis Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Internal

Sistematika Penulisan

Bab 2 : Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Rencana Strategis

Pernyataan Visi

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja

Capaian Indikator Kinerja

Capaian Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional

Analisis Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

Perbandingan Capaian Kinerja

Realisasi Anggaran Tahun 2024

Prestasi dan Inovasi

Bab 4 : Penutup

Kesimpulan

Saran

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Prestasi dan Penghargaan
3. Inovasi





BAB 2 Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Rencana Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat senantiasa mengacu pada visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Untuk mewujudkan visi Kota Jakarta khususnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2022 telah ditetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 yang antara lain berisi tujuan dan sasaran strategis yang akan ditempuh dalam kurun waktu empat tahun ke depan sekaligus sebagai panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Renstra tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pernyataan Visi

Sebagai pemberi arah dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu ditetapkan bersama suatu pandangan ke depan (*vision*) yang akan menjadi sumber motivasi dan inovasi dinamis dalam mewujudkan berbagai bentuk pelayanan publik yang prima. Gambaran ke depan yang dimaksud dirumuskan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Barat. Visi Kota Administrasi Jakarta Barat adalah :

“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Jasa yang nyaman dan Sejahtera”

Dalam rangka mewujudkan kondisi ideal tersebut, maka dirumuskan sebanyak 4 (empat) Misi sebagai hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai Visi Kota Administrasi Jakarta Barat, yaitu:

Membangun Tata Pemerintahan yang baik guna terwujudnya sebagai sebagai kota jasa dan wisata budaya dan bersejarah.

1. Membangun Tata Pemerintahan yang baik guna terwujudnya sebagai sebagai kota jasa dan wisata budaya dan bersejarah.
2. Meningkatkan Kualitas lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.
3. Memberdayakan Masyarakat dengan mengembangkan nilai, norma serta pranata sosial.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari visi dan misi tersebut adalah ” **Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal**” sehingga tujuan Kota Administrasi Jakarta Barat kurun waktu tahun 2023-2026 ”**Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal**” dapat terwujud. Pada Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan penunjang dukungan pada pembangunan berkelanjutan pada periode pertama tahun 2023 sesuai dengan pernyataan visi dan misi Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan menyelaraskan pada rencana renstra 2023-2026 yang telah disepakati.

Tujuan kota Administrasi Jakarta Barat memiliki keterkaitan dengan Tujuan keempat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, yaitu Transformasi Pelayanan Publik Dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas. Sasaran yang berkaitan dengan tujuan Renstra Jakarta Barat adalah sasaran pertama dari tujuan RPD tersebut, yaitu Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat. Tujuan dan Sasaran RPD beserta Indikator Kinerja terkait, sebagai berikut:

**Tabel 8. Tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja RPD terkait
Tujuan Renstra Tahun 2023-2026**

No	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja			
				2023	2024	2025	2026
1	Transformasi Pelayanan Publik Dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82	83	84	85
2	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,50	88,60	88,70	90,00

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Barat akan diukur melalui terwujudnya atau tidaknya target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0043 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026.

Secara terperinci target kinerja Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Barat yang akan dicapai pada setiap tahun antara tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 9. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra Kota Adm.
Jakarta Barat Tahun 2023-2026**

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja			
					2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	86,75	87,30	87,85	89,50
1.1		Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kecamatan dan kelurahan	Nilai	88,50	88,60	88,70	88,80
			Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	85,00	86,00	87,00	88,50

Sasaran strategis Walikota Jakarta Barat merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dan dialokasikan dalam 4 (empat) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan berikut dengan indikator kinerja dari program dan kegiatan.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Kinerja penyelenggaraan urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat yang mengemban urusan pemerintahan umum sesuai pembagian bidang

urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut dari tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama ke dalam program dan indikator kinerja program terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Keterkaitan Indikator Sasaran dengan Program dan Indikator Kinerja Program

Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
			2023	2024	2025	2026
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kecamatan dan kelurahan	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan Ruang Interaksi Warga	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	51,30	57,89	61,74	66,09
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	86	86	87	88,5
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	86	86	87	88,5
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	86	86	87	88,5

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan penugasan pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran, indikator dan target kinerja. Perjanjian kinerja merepresentasikan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Melalui penetapan perjanjian kinerja, peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur diharapkan dapat tercapai karena tersedia kejelasan ukuran penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan untuk melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah disusun dengan ketentuan menggunakan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Eselon II atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan.

Pada tahun 2024, dalam rangka mendorong ketercapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang lebih tinggi, target kinerja pada perjanjian kinerja tidak mengacu pada target kinerja yang tercantum dalam Renstra. Hal ini diatur dalam Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah tersebut,

penetapan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mempertimbangkan realisasi kinerja tahun 2023, yaitu sekurang-kurangnya sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023. Penyesuaian target ini disupervisi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur dan Instruksi Sekretaris Daerah dimaksud, telah dilakukan penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Barat antara Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, terdapat dokumen resmi yang berisi sasaran, indikator, dan target kinerja yang menjadi tolok ukur evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Sasaran, indikator, dan target kinerja yang tertuang dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Barat :

Tabel 11. Target Kinerja Sasaran Strategis sesuai Lampiran Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	92,33
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	94,905
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	89,755

Tabel 12. Rencana Aksi IKU Walikota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	92,33	RA2. Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Jakarta Barat Semester 1 Tahun 2024	KK2.1. Tersusunnya Dokumen Laporan Hasil Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Barat semester 1 Tahun 2024	T/02.1.1. Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Jakarta Barat Semester 1 Tahun 2024	TW 2
				RA4. Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Jakarta Barat Semester 2 Tahun 2024	KK4.1. Tersusunnya Dokumen Laporan Hasil Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Barat semester 2 Tahun 2024	T/04.1.1. Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Jakarta Barat Semester 2 Tahun 2024	TW 4
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	94,905	RA1. Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dan Persiapan SKM Semester 1 Tahun 2024	KK1.1. Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dan Persiapan SKM Semester 1 Tahun 2024	T/01.1.1 Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dan Persiapan SKM Semester 1 Tahun 2024	TW 1
				RA2. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	KK2.1 Tersusunnya Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	T/02.1.1 Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	TW 2
				RA3 Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024 dan Persiapan SKM Semester 2 Tahun 2024	KK3.1 Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024 dan Persiapan SKM Semester 2 Tahun 2024	T/03.1.1 Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024 dan Persiapan SKM Semester 2 Tahun 2024	TW 3
				RA4. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	KK4.1 Tersusunnya Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	T/04.1.1 Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	TW 4
				RA5. Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	KK5.1 Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	T/05.1.1 Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	TW 4
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	89,755	RA1. Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun 2023	KK1.1. Terlaksananya Evaluasi Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun 2023	T/01.1.1 Nota Dinas atau Laporan Hasil Survey Tahun 2023	TW 1
				RA2. Pelaksanaan Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun Semester 1 dan Tindak Lanjut Hasil Survey Tahun 2023	KK2.1 Terlaksananya Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tindak Lanjut Hasil Survey Tahun 2023	T/02.1.1 Nota Dinas atau Laporan Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023	TW 2
				RA3 Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	KK3.1 Tersusunnya Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	T/03.1.1 Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	TW 2
				RA4. Pelaksanaan Evaluasi Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	KK4.1 Terlaksananya Evaluasi Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	T/04.1.1 Nota Dinas atau Laporan Hasil Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	TW 3
				RA5. Pelaksanaan Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun Semester 2 dan Tindak Lanjut Hasil Survey Semester 1 Tahun 2024	KK5.1 Terlaksananya Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun Semester 2 Tahun 2024 dan Tindak Lanjut Hasil Survey Semester 1 Tahun 2024	T/05.1.1 Nota Dinas atau Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Survey Semester 1 Tahun 2024	TW 4
				RA6. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	KK6.1 Tersusunnya Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	T/06.1.1 Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	TW 4

Selain target kinerja pada sasaran strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Tahun 2024 dalam pelaksanaan sebagaimana tercantum, mewajibkan tercapainya target pada setiap triwulan. Adapun Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 13. Target Kinerja KSD Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
1	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2024	e-Monev KSD	100%	Persentase
2	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	100%	Persentase
3	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	e-Monev KSD	100%	Persentase
4	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	e-Monev KSD	100%	Persentase

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
5	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapanya.	e-Monev KSD	100%	Persentase
6	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosia	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	100%	Persentase

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat pelaksanaan Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional dalam pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah yang mempengaruhi pada capaian Kinerja Perangkat Daerah dan penerimaan penghasilan bila tidak tercapai capaian target yang telah ditetapkan. Sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Target Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
Sasaran Khusus						
1	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	100%	Persentase

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
2	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	1	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	3,25	Nilai
3	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	100%	Persentase
4	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	80%	Persentase
5	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	100%	Persentase
6	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	100%	Persentase
7	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	100%	Persentase
8	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	71%	Persentase
Sasaran Operasional						
9	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	100%	Persentase

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
10	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100%	Persentase
11	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	100%	Persentase

Alokasi Anggaran Tahun 2024

Target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut di atas, diwujudkan melalui penyelenggaraan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 15. Program dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
1	Program Pengelolaan Kecamatan	528.106.635.928	516.906.371.705
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	562.047.686	547.553.678
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	303.633.989.969	297.249.430.770
	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	218.691.469.893	214.998.038.733
	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	5.219.128.380	4.111.348.524
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	103.374.460.246	102.610.953.435
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	90.727.446.946	89.935.740.685
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12.647.013.300	12.675.212.750

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
3	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.126.309.248	2.674.412.528
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.126.309.248	2.674.412.528
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	400.828.912.265	402.261.169.552
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	298.264.080.587	298.381.460.665
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	568.858.019	609.353.962
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.259.809.087	12.943.000.993
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.266.238.301	4.889.703.403
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.929.175.642	50.554.610.051
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.540.750.629	34.883.040.478
5	Program Pengelolaan Kota Administrasi	2.752.942.091	3.216.632.162
	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	2.752.942.091	3.216.632.162
Total Anggaran		1.038.189.259.778	1.027.669.539.382





BAB

3

Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat di dalam Bab 3 ini akan menyajikan akuntabilitas kinerja yang meliputi capaian kinerja Indikator Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan uraian capaian masing-masing sarannya. Laporan ini akan memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

1. Metode Pengukuran Kinerja

Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, pembandingan kinerja yang (seharusnya) terjadi atau realisasi dengan kinerja yang diharapkan atau target dilakukan dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Karakteristik komponen realisasi tersebut, antara lain :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik; dan
2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja.

Mencermati Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Barat dimana seluruh target indikator kinerja memiliki karakteristik semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja maka dalam pengukuran capaian kinerja rumus yang digunakan :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan penyimpulan capaian kinerja organisasi secara keseluruhan dan capaian masing-masing sasaran strategis. Capaian kinerja organisasi merupakan nilai rata-rata dari seluruh capaian sasaran strategis. Penyimpulan dilakukan dengan memberi interpretasi atau makna atas nilai rata-rata yang diperoleh. Makna dari nilai tersebut diambil dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25

Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dapat digambarkan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 16. Interpretasi Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	Kode
1	AA	>85 – 100	Memuaskan	
2	A	> 75 – 85	Sangat Baik	
3	B	> 65 – 75	Baik	
4	CC	> 50 – 65	Cukup	
5	C	> 30 – 50	Kurang	
6	D	0 – 30	Sangat kurang	

Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Utama

Sebagai alat untuk mengukur kinerja yang hasilnya dapat dipergunakan untuk melihat aspek-aspek yang harus diperbaiki dalam rangka peningkatan kinerja berikut akuntabilitasnya, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi tercermin dari terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan. Terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan tercermin pencapaian target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0043 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026.

Hasil pengukuran untuk tahun 2024 yang merupakan tahun pertama periode Rencana Strategis 2023-2026 atas pencapaian target indikator kinerja utama Kota Administrasi Jakarta Barat serta perbandingannya dengan target akhir yang diharapkan, menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	92,33	95,99	103,96
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	94,91	96,18	101,33
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	89,76	95,81	107,49

Berdasarkan tabel tersebut, nilai Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi pada tahun 2024 mencapai angka 95,99 telah memberi kontribusi yang sangat baik bagi pencapaian target Rencana Strategis 2023-2026 karena telah berhasil mencapai 103,96 % dari target kinerja yang diharapkan dapat terwujud. Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan telah berhasil mencapai 101,33 % serta Indeks Efektifitas

Koordinasi Kota administrasi telah berhasil mencapai 107,49 % dari target kinerja.

Perbandingan realisasi, target dan capaian indikator kinerja utama pada tahun 2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 18. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2022	N/A	N/A	N/A
2	2023	86,75	92,33	106,43 %
3	2024	92,33	95,99	103,96 %

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi pertama kali menjadi target di tahun 2023. Pada tahun 2024, realisasi sebesar 95,99 melampaui target sebesar 92,33. Realisasi capaian indikator kinerja ini sebesar 103,96%.

Tabel 19. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2021	88	90,62	102,98 %
2	2022	88,5	93,59	105,75 %
3	2023	88,5	94,91	107,24 %
4	2024	94,91	96,18	101,34 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan senantiasa berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat telah puas dengan pelayanan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat terutama kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).

Tabel 20. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2022	N/A	N/A	N/A
2	2023	85	89,76	105,60 %
3	2024	89,76	95,81	106,74 %

Indikator kinerja Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi pertama kali menjadi target di tahun 2023. Pada tahun 2024, target sebesar 89,76 berhasil terlampaui dengan realisasi sebesar 95,81. Realisasi capaian indikator kinerja ini mencapai 106,74%. Dari hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota Administrasi Jakarta Barat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat berjalan dengan optimal.

Realisasi indikator kinerja utama diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat dan efektivitas koordinasi kota administrasi, berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat telah puas dengan pelayanan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat terutama kecamatan dan kelurahan.

Beberapa faktor penunjang yang memungkinkan tercapainya target indikator kinerja utama, antara lain :

1. Dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dilaksanakan aparat kecamatan dan kelurahan.
2. Kinerja yang baik dari para Camat dan Lurah beserta seluruh jajarannya dalam memberikan layanan kemasyarakatan.
3. Koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit/instansi terkait.
4. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan survei yang memberi kemudahan bagi responden.

Upaya mewujudkan sasaran strategis pada Tahun 2024 dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program. Target, realisasi dan capaian dari masing-masing indikator kinerja program dengan sumber data pada pengolahan Akuntabilitas Pemerintah dimaksud dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 21. Capaian Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Program

Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kecamatan dan kelurahan	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4	4	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4	4	100%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan Ruang Interaksi Warga	4	4	100%
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4	4	100%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	57,39	57,66	100,47%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4	4	100%
Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	89,76	99,77	111,1%
		Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	89,76	95,04	105,9%
		Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	89,76	92,62	103,2%

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja program antara tahun 2023 dengan tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 22. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program

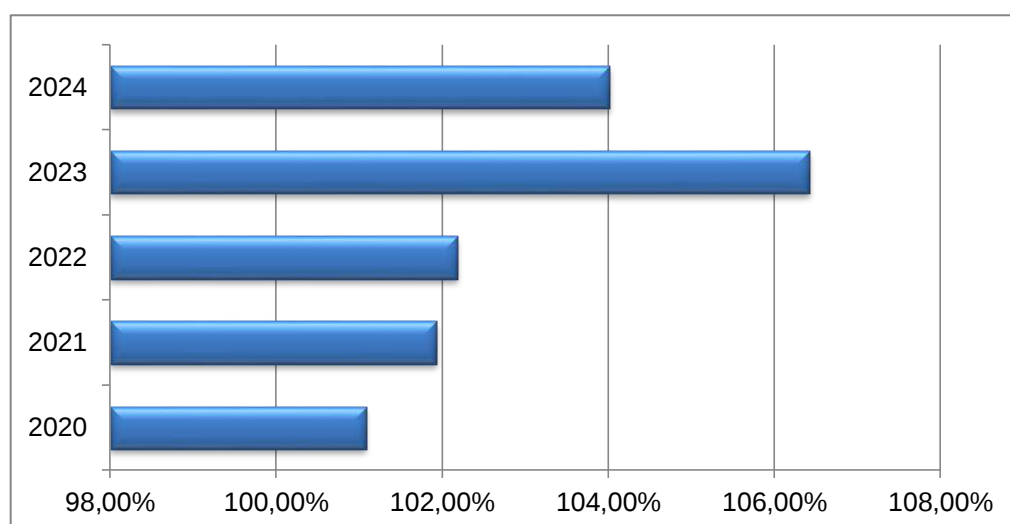
No	Indikator Kinerja	Capaian	Capaian
		2023	2024
1	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	100%	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	100%	100%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan Ruang Interaksi Warga	100%	100%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	100%	100%
5	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	110,6%	100,47%
6	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	100%	100%
7	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	99,55%	111,10%
8	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	109,6%	105,9%
9	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	107,6%	103,2%

Pada tahun kedua dari periode Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Barat 2023-2026, pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, telah terlaksana dengan cukup baik. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat pada akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	92,33	Nilai	95,99	103,96%
		Capaian Sasaran Strategis	103,96%			
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	94,91	Nilai	96,18	101,34%
		Capaian Sasaran Strategis	101,34%			
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	89,76	Indeks	95,81	106,74%
		Capaian Sasaran Strategis	106,74%			
Capaian Kinerja Kota Administrasi						104,01%

Perkembangan capaian Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat di lihat pada grafik sebagai berikut :



Grafik 2. Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dari tabel hasil pengukuran dan grafik perbandingan capaian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat senantiasa harapan berada diatas 100%. Grafik capaian Perjanjian Kinerja menunjukkan kenaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2023, namun terjadi penurunan pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan target sebesar realisasi kinerja tahun 2023 yang nilainya lebih tinggi daripada target yang tercantum dalam Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Barat. Sementara itu, berdasarkan hasil evaluasi, Indikator kinerja Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi dalam rangka mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran” berkontribusi paling besar pada capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yaitu sebesar 106,74%.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perhitungan capaian indikator kinerja tersebut diinterpretasikan sebagai berikut:

Tabel 24. Interpretasi Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Capaian	Realisasi	
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	103,96%	AA	Memuaskan 
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	101,34%	AA	Memuaskan 
		106,74%	AA	Memuaskan 
	Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat	104,01%	AA	Memuaskan

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan nilai capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2024 adalah sebesar 104,01%. Dengan nilai tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2024 untuk mewujudkan target, sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 antara Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, telah terselenggara dengan baik dan menunjukkan kinerja yang termasuk dalam kategori AA atau memuaskan.

Seluruh sasaran strategis berhasil melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat dari masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagai berikut:



Pemerintahan akan sangat terbantu kinerjanya apabila tata kelola pemerintahan merupakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dimensi dari *good governance* yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek akuntansi adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam tatakelola pemerintahan memiliki arti sejauhmana pemerintahan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar. Transparansi memungkinkan semua stakeholder dalam melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi keuangan serta laporan pertanggungjawaban. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Sementara akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja suatu organisasi. Dengan demikian transparan dan akuntabel dapat dimaknai sebagai kemampuan pejabat publik untuk menjawab secara terbuka segala pertanyaan dari masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka.

Untuk mengukur kinerja aparatur di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (*stakeholders*) perihal kebutuhan dan harapan, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan dasar Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan Surat Keputusan Walikota Nomor e-0007 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024.

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka disebut Indeks Kepuasan Masyarakat, angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Unsur survei kepuasan masyarakat merupakan faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik. Survei

Kepuasan Masyarakat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Walikota. IKM sangat berguna untuk memahami kebutuhan pengguna layanan dan sebagai tolok ukur kinerja pelayanan publik. Panduan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Keberhasilan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas selalu menjadi tantangan bagi institusi pelayanan baik publik maupun swasta. Institusi pelayanan dituntut menjadi organisasi yang handal dimana seluruh elemen penggerak di dalam organisasi diberikan kebebasan untuk berdiskusi dan menjalankan standar yang menjadi kesepakatan sehingga konsistensi dalam proses pelayanan tetap terjaga. Implementasi dari pelayanan yang dijalankan tersebut haruslah dipantau dan dievaluasi secara sistematis dan teratur.

Survei Kepuasan Masyarakat selain dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan, juga memungkinkan perbaikan pelayanan selain itu menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Melalui analisis kinerja dapat disusun prioritas perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan di Walikota Jakarta Barat. Pengukuran yang berkesinambungan akan memungkinkan untuk mengetahui kinerja pelayanan masing-masing

Kelurahan dan Kecamatan serta untuk memperoleh unsur pelayanan mana yang dianggap penting oleh masyarakat yang menjadi prioritas untuk diperbaiki kualitasnya. Dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat mengadakan Survei Kepuasan Masyarakat.

Adapun sasaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kota Administrasi Jakarta Barat adalah mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong penyelenggara pelayanan publik menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik, dan mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dengan pengisian survei melalui link yang disebarakan kepada para pengguna 7 (tujuh) jenis layanan. 7 (tujuh) jenis layanan, antara lain :

1. Pelayanan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU);
2. Pelayanan Keamanan dan Ketertiban;
3. Pelayanan Juru Pemantau Jentik (Jumantik);
4. Pelayanan PKK;
5. Pelayanan RPTRA;

6. Pelayanan Posyandu;
7. RT, RW, LMK, dan FKDM.

Jumlah minimal responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode adalah 100 orang tiap layanan. Responden harus memberikan penilaian terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan, antara lain :

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan Prasarana.

Survei Kepuasan Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta

Barat Tahun 2024 dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu :

1. Semester I (27 Maret – 28 April 2024)
2. Semester II (13 September – 10 Oktober 2024)

Tabel 25. Jadwal Pelaksanaan SKM Tahun 2024

Kegiatan	Bulan									
	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Persiapan dan perencanaan SKM Semester I 2024										
Pelaksanaan SKM Semester I 2024										
Pengolahan data/analisis data SKM Semester I 2024 oleh Diskominfotik										
Penyerahan hasil analis data SKM Semester I 2024 oleh Diskominfotik										
Pengolahan data/ analisis data oleh Bagian KKPP Jakarta Barat										
Penyampaian hasil SKM Semester I 2024 ke tingkat Provinsi										
Pelaksanaan SKM Semester II 2024										
Pengolahan data/analisis data SKM Semester II 2024 oleh Diskominfotik										
Penyerahan hasil analis data SKM Semester II 2024 oleh Diskominfotik										
Penyusunan Laporan SKM Semester II 2024 oleh Bagian KKPP Jakarta Barat										
Penyampaian hasil SKM Semester II 2024 ke tingkat Provinsi										

Data yang telah terkumpul dilakukan pengolahan data untuk mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai IKM didapatkan dari nilai rata-rata tertimbang masing masing 9 unsur pelayanan tersebut. Dalam Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat, Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus :

$$\text{Nilai Rata2 Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot 1}}{\text{Jumlah Unsur 9}} = \dots = 0,11$$

Selanjutnya untuk mendapatkan nilai IKM dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Berdasarkan petunjuk dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan memperhitungkan total nilai persepsi untuk setiap unsur pelayanan, Total nilai persepsi diperoleh dengan mengalikan frekuensi responden yang memberikan jawaban untuk setiap skala penilaian. Misalnya untuk dimensi kinerja, nilai 1 diberikan untuk penilaian Sangat Tidak Setuju (STS), nilai 2 Tidak Setuju (TS), nilai 3 (Setuju) dan nilai 4 (Sangat Setuju). Selanjutnya jawaban dikonversikan dengan nilai dasar 25 digunakan untuk mendapatkan rentang penilaian antara 25 – 100 sehingga diperoleh nilai IKM. Nilai IKM kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori A (Sangat Baik), B (Baik), C (Kurang Baik) dan D (Tidak Baik) sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 26. Klasifikasi Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25.00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65.00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,07 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,54 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Untuk menentukan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Barat dihitung dengan memperhitungkan total nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat seluruh Kecamatan dibagi jumlah Kecamatan, maka IKM Kota Administrasi Jakarta Barat ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$IKM \text{ Kota Adm. Jakarta Barat} = \frac{\text{Total IKM Kecamatan}}{\text{Jumlah Kecamatan}}$$

Kota Administrasi Jakarta Barat telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat pada Semester I (1 April – 7 Mei 2024) dan Semester II (12 – 30 Agustus 2024) dengan jenis survei sesuai dengan indikator. Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat didapatkan dari nilai rata-rata IKM pelayanan masing-masing Kecamatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 27. Nilai SKM Pada Kecamatan Kota Adm Jakarta Barat Semester I Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	UNSUR 1	UNSUR 2	UNSUR 3	UNSUR 4	UNSUR 5	UNSUR 6	UNSUR 7	UNSUR 8	UNSUR 9	IKM
1	Cengkareng	93,49	94,68	95,02	95,16	95,14	95,18	95,51	94,67	94,39	94,80
2	Grogol Petamburan	97,83	97,96	97,88	98,08	97,96	98,02	98,18	98,07	98,03	98,00
3	Kalideres	96,32	96,32	96,28	96,46	96,48	96,38	96,57	96,31	96,37	96,39
4	Kebon Jeruk	96,90	96,91	97,00	97,02	97,00	97,03	97,07	97,01	97,08	97,00
5	Kembangan	95,68	95,72	95,78	96,08	95,75	95,86	95,73	95,65	95,38	95,74
6	Palmerah	93,81	93,97	94,02	94,40	94,18	94,28	94,50	94,44	94,37	94,22
7	Tamansari	95,38	95,17	95,29	95,56	95,44	95,48	95,62	95,52	95,48	95,44
8	Tambora	97,02	96,99	96,98	97,00	96,91	96,78	97,03	96,97	96,86	96,95
IKM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		95,80	95,96	96,03	96,22	96,11	96,12	96,28	96,08	96,00	96,07

Tabel 28. Nilai SKM Pada Kecamatan Kota Adm Jakarta Barat Semester II Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	UNSUR 1	UNSUR 2	UNSUR 3	UNSUR 4	UNSUR 5	UNSUR 6	UNSUR 7	UNSUR 8	UNSUR 9	IKM
1	Cengkareng	93,92	94,89	94,89	95,00	94,98	95,06	95,44	95,30	94,81	94,92
2	Grogol Petamburan	97,32	97,30	97,30	97,43	97,42	97,34	97,54	97,36	97,33	97,37
3	Kalideres	95,48	95,48	95,52	95,74	95,53	95,47	95,62	95,49	95,52	95,54
4	Kebon Jeruk	97,89	98,00	96,44	97,96	98,06	98,14	98,34	98,30	98,33	97,94
5	Kembangan	96,98	96,89	97,03	97,21	97,04	97,02	97,08	97,06	96,88	97,02
6	Palmerah	90,30	90,58	90,35	90,92	90,48	90,66	93,22	93,27	93,20	91,44
7	Tamansari	98,20	97,81	97,86	98,07	97,85	97,48	97,96	97,49	98,00	97,86
8	Tambora	98,28	98,25	98,03	98,11	98,00	98,15	98,26	98,32	98,20	98,18
IKM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		96,05	96,15	95,93	96,30	96,17	96,17	96,68	96,57	96,53	96,28

$$IKM \text{ Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2024} = \frac{IKM I + IKM II}{2}$$

$$= \frac{96,07 + 96,28}{2} = 96,18$$

Berdasarkan perhitungan di atas, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Barat Pada Tahun 2024 adalah 96,18 (SANGAT BAIK). Dari pengolahan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan di seluruh Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara total responden menilai pelayanan yang diterima di Kota Administrasi Jakarta Barat sudah berada dalam kategori Sangat Baik dengan nilai IKM sebesar 96,18. Hal tersebut dikarenakan hampir semua nilai IKM di Kecamatan berada di atas batas minimal nilai IKM.
2. Masih adanya beberapa Kecamatan dan Kelurahan yang memerlukan perbaikan dan pembinaan terhadap tingkat kepuasan masyarakat pada unsur-unsur pelayanan yang masih rendah.

Untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi kembali penggunaan Aplikasi pada jaksurvei.jakarta.go.id dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatkan kinerja serta kemampuan para pengelola dalam memberikan pelayanan.

Dari hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan pengolahan data/angka Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan pada Tahun 2024, diperoleh angka Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar 96,18.

Angka Indeks tersebut melebihi target yang telah ditetapkan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 88,5. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat tersebut baik untuk masing-masing bidang pelayanan maupun nilai total kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dan kelurahan, antara lain :

1. Dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dilaksanakan aparat kecamatan dan kelurahan.
2. Kinerja yang baik dari para Camat dan Lurah beserta seluruh jajarannya dalam memberikan layanan kemasyarakatan.
3. Proses pelayanan yang sederhana, cepat, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Informasi yang jelas dan transparan mengenai kegiatan kemasyarakatan, termasuk program, jadwal, dan prosedur.
5. Profesionalisme, keramahan, dan kemampuan petugas dalam membantu masyarakat secara efektif.
6. Fasilitas pendukung yang memadai, seperti ruang layanan yang nyaman dan sistem digital yang mempermudah pelayanan.
7. Keterlibatan warga dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, sehingga layanan lebih sesuai dengan kebutuhan
8. Koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit/instansi terkait.
9. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan survei yang memberi kemudahan bagi responden.

Di samping adanya faktor pendorong tersebut, dari hasil evaluasi diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam upaya mengejar target Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, yaitu :

1. Perubahan dan pergeseran anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang berjalan namun tidak menggunakan anggaran.

Peningkatan angka realisasi dan capaian kinerja dari sasaran strategis Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal, menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat telah puas dengan pelayanan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat. Angka Indeks pada tahun 2024 tersebut melebihi target yang telah ditetapkan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu sebesar 94,91 dan termasuk dalam kategori A (Sangat Baik).

2. Survei Indeks Efektivitas Koordinasi

Selain Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), untuk mengetahui kinerja pelayanan, perlu dilaksanakan Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi. Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan pengukuran terhadap Efektivitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya. Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan

koordinasi Kota Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden para Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.

Keberhasilan untuk meningkatkan kinerja koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan yang optimal selalu menjadi tantangan bagi institusi pelayanan publik. Institusi pelayanan publik dituntut menjadi organisasi yang handal di mana seluruh elemen penggerak di dalam organisasi. Implementasi dari Standar Prosedur Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan haruslah dipantau dan dievaluasi secara sistematis dan teratur.

Adapun sasaran pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat adalah mendorong Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat dan Pejabat di bawah koordinasinya menjadi lebih inovatif dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan melalui koordinasi yang efektif dan efisien.

Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan dengan pengisian survei melalui link yang dikirimkan langsung kepada para Kepala UKPD di Kota Administrasi Jakarta Barat selaku responden. Responden harus memberikan penilaian terhadap 9 (Sembilan) indikator pelayanan, antara lain :

1. Persyaratan, variabelnya adalah mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur, variabelnya adalah Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi.
3. Waktu, variabelnya adalah Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai.
4. Biaya, variabelnya adalah tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi.
5. Produk pelayanan, variabelnya adalah tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi dan Mengingatn setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati bersama
6. Kompetensi pelaksana, variabelnya adalah mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan, mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan, mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya
7. Perilaku pelaksana, variabelnya adalah sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi, menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi

8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, variabelnya adalah menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi
9. Sarana dan prasarana, variabelnya adalah menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi.

Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu :

1. Semester I (27 Mei – 7 Juni 2024)
2. Semester II (18 - 29 November 2024)

Tabel 29. Jadwal Pelaksanaan Survei Efektivitas Koordinasi Tahun 2024

Kegiatan	Bulan									
	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Pengumpulan data responden										
Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Semester I 2024										
Pengolahan data/analisis data Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Semester I 2024 oleh Diskominfo										
Penyajian Data Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Semester I 2024 oleh Diskominfo										
Penyusunan Laporan Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Semester I 2024 oleh Bagian KKPP Jakarta Barat										
Penyampaian hasil SKM Semester I 2024 ke tingkat Provinsi										
Pengumpulan data responden										
Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Semester II 2024										
Pengolahan data/analisis data Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Semester II 2024 oleh Diskominfo										
Penyajian Data Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Semester II 2024 oleh Diskominfo										
Penyampaian hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Semester II 2024 ke tingkat Provinsi										

Analisis Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Rata2 Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot 1}}{\text{Jumlah Unsur 9}} = \dots = 0,11$$

Selanjutnya untuk mendapatkan nilai Indeks Efektivitas Koordinasi (IEK) dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IEK} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Kota Administrasi Jakarta Barat telah melaksanakan Survei Indeks Efektivitas Koordinasi pada Semester I (27 Mei – 7 Juni 2024) dan Semester II (18 - 29 November 2024) Tahun 2024. Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Barat didapatkan dari nilai rata-rata Indeks Efektivitas Koordinasi masing-masing Asisten sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 30. Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Tahun 2024

	Kota Administrasi Jakarta Barat	Asisten Administrasi dan Kesra	Asisten Pemerintahan	Asisten Perekonomian & Pembangunan
Semester I	95,13	89,94	99,54	95,92
Semester II	96,48	95,29	100	94,15
Tahun 2024	95,81	92,62	99,77	95,04
Predikat Mutu	A (SANGAT BAIK)	A (SANGAT BAIK)	B (BAIK)	A (SANGAT BAIK)

Berdasarkan perhitungan di atas, Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Barat Pada Tahun 2024 adalah 95,81 (SANGAT BAIK). Dari pengolahan hasil survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara total responden menilai efektivitas koordinasi para asisten di Kota Administrasi Jakarta Barat sudah berada dalam kategori Sangat Baik dengan nilai IKM sebesar 95,81.
2. Indeks efektivitas Tahun 2024 dari masing-masing Asisten Sekretaris Kota Wilayah Jakarta Barat adalah 92,62 (Mutu A) untuk Asisten Sekretaris Bidang Administrasi dan Kesejahteraan, 99,77 (Mutu A) untuk Asisten Sekretaris Bidang Pemerintahan, dan 95,04 (Mutu A) untuk Asisten Sekretaris Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Untuk meningkatkan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pertemuan rutin UKPD di bawah koordinasi para asisten secara berkala sehingga memudahkan koordinasi pelaksanaan program kerja dan pemecahan masalah yang terjadi lintas UKPD serta tingkatan peran asistensi kepada UKPD.
2. Peningkatan efektivitas berbagai rapat koordinasi antara UKPD yang kegiatannya saling bersinggungan sehingga tercapai output yang maksimal dari kegiatan.

Dari hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan pengolahan data/angka Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta barat yang dilaksanakan pada Tahun 2024, diperoleh angka Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar 95,81. Angka Indeks tersebut melebihi target yang telah ditetapkan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 89,76. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong peningkatan nilai Indeks Efektivitas Koordinasi, antara lain:

1. Dukungan para kepala UKPD dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dilaksanakan Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Kinerja yang baik dari pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Barat UKPD di wilayahnya efektif dan efisien, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat.
3. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan survei yang memberi kemudahan bagi responden.

Di samping adanya faktor pendorong tersebut, dari hasil evaluasi diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam upaya mengejar target Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, yaitu :

1. Perubahan dan pergeseran anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang anggaran berjalan namun tidak menggunakan anggaran.

2. Terjadinya pemulihan ekonomi dari situasi pandemi Covid-19.

Peningkatan angka realisasi dan capaian kinerja dari sasaran strategis Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal, menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat telah puas dengan pelayanan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat. Angka Indeks pada tahun 2023 tersebut melebihi target yang telah ditetapkan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu sebesar 86,75 dan termasuk dalam kategori A (Sangat Baik).

3. Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi

Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi diperoleh dengan perhitungan rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi

Keberhasilan untuk meningkatkan kinerja koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan yang optimal dan memberikan pelayanan yang berkualitas selalu menjadi tantangan bagi institusi pelayanan publik. Institusi pelayanan publik dituntut menjadi organisasi yang handal di mana seluruh elemen penggerak di dalam

organisasi. Implementasi dari Standar Prosedur Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan haruslah dipantau dan dilakukan evaluasi secara sistematis dan teratur.

Hasil perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan yang optimal.

Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi diperoleh dengan perhitungan rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi. Perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{array}{rcl} \text{Indeks Kepuasan} & & \text{Indeks Kepuasan Masyarakat} \\ \text{Layanan Administrasi} & = & + \\ & & \text{Indeks Efektivitas Koordinasi kota} \\ & & \text{Jumlah Indeks} \\ & & \hline & & 96,18 + 95,81 \\ & & \hline & & 2 \end{array} = 95,99$$

Berdasarkan perhitungan di atas, Indeks Layanan Kepuasan Kota Administrasi Jakarta Barat adalah 95,99. Nilai tersebut termasuk dalam kriteria mutu "Sangat Baik".

Tabel 31. Capaian Rencana Aksi IKU Walikota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Target/Output	Keterangan
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	92,33	RA2. Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Jakarta Barat Semester 1 Tahun 2024	T/O2.1.1. Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Jakarta Barat Semester 1 Tahun 2024	Terealisasi pada TW 2
				RA4. Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Jakarta Barat Semester 2 Tahun 2024	T/O4.1.1. Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Jakarta Barat Semester 2 Tahun 2024	Terealisasi pada TW 4
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	94,91	RA1. Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dan Persiapan SKM Semester 1 Tahun 2024	T/O1.1.1 Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dan Persiapan SKM Semester 1 Tahun 2024	Terealisasi pada TW 1
				RA2. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	T/O2.1.1 Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	Terealisasi pada TW 2
				RA3 Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024 dan Persiapan SKM Semester 2 Tahun 2024	T/O3.1.1 Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024 dan Persiapan SKM Semester 2 Tahun 2024	Terealisasi pada TW 3
				RA4. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	T/O4.1.1 Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	Terealisasi pada TW 4
				RA5. Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	T/O5.1.1 Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	Terealisasi pada TW 4
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	89,76	RA1. Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun 2023	T/O1.1.1 Nota Dinas atau Laporan Hasil Survey Tahun 2023	Terealisasi pada TW 1
				RA2. Pelaksanaan Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun Semester 1 dan Tindak Lanjut Hasil Survey Tahun 2023	T/O2.1.1 Nota Dinas atau Laporan Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023	Terealisasi pada TW 2
				RA3 Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	T/O3.1.1 Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	Terealisasi pada TW 2
				RA4. Pelaksanaan Evaluasi Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	T/O4.1.1 Nota Dinas atau Laporan Hasil Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	Terealisasi pada TW 3
				RA5. Pelaksanaan Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun Semester 2 dan Tindak Lanjut Hasil Survey Semester 1 Tahun 2024	T/O5.1.1 Nota Dinas atau Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Survey Semester 1 Tahun 2024	Terealisasi pada TW 4
				RA6. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	T/O6.1.1 Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	Terealisasi pada TW 4

Capaian Kegiatan Strategis Daerah

1. Capaian Kegiatan Strategis Daerah 2024

Sebagai dukungan pelaksanaan perjanjian kinerja pada Kegiatan Strategis Daerah tahun 2024 terdapat pelaksanaan sebanyak 3 Kegiatan Strategis Daerah (KSD) 6 kegiatan Sub KSD yang tercapai dengan realisasi pelaksanaan Rencana Aksi pada setiap triwulan pada B03, B06, B09, dan B12. Terdapat 26 target Rencana Aksi yang terbagi sebanyak 5 target renaksi pada target B03, 8 target renaksi pada target B06, 6 target renaksi pada target B09, dan 7 target renaksi pada target B012. Keberhasilan pencapaian realisasi Kegiatan Strategis Daerah tercermin dari terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan dari pelaksanaan rencana aksi dengan kolaborasi dan penataan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat.

Hasil pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah untuk tahun 2024 yang merupakan pencapaian seluruh bagian UKPD dan unsur teknis atas pencapaian Kota Administrasi Jakarta Barat serta perbandingannya dengan target akhir yang diharapkan, menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja KSD tahun 2024

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
Kegiatan Strategis Daerah 2024						
1	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	100%	Terealisasi pada B06, B09, dan B12
2	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	100%	Terealisasi pada B03, B06, B09, dan B12
3	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	e-Monev KSD	100%	Terealisasi pada B12
4	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	e-Monev KSD	100%	Terealisasi pada B06,B09 dan B12

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
5	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapannya.	e-Monev KSD	100%	Terealisasi pada B06
6	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosia	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	100%	Terealisasi pada B03,B06,B09 dan B12

Kegiatan Strategis Daerah selain dimaksudkan untuk mendukung tingkat pembangunan dan rencana kinerja Tahun 2024, dilakukan berkelanjutan dan mencapai target sasaran yang perlu ditambah menjadi bagian dari Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2024. Dari hasil pelaksanaan KSD Tahun 2024 melalui sistem monitoring ksd.jakarta.go.id dengan pengolahan data maka capaian pelaksanaan Renaksi seluruh KSD terealisasi dengan baik dengan capaian Persentase 100 % pada Tahun 2024. Persentase tersebut memenuhi target yang telah ditetapkan untuk Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta dengan Capaian 100%. Secara terperinci dibandingkan dengan capaian setiap tahun maka pencapaian dapat digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 33. Perbandingan Target dan Realisasi KSD
Tahun 2018 sampai dengan tahun 2024**

No	Tahun	Renaksi	Target	Realisasi	Capaian
1	2018	3	100	100	100,00%
2	2019	15	100	100	100,00%
3	2020	37	100	100	100,00%
4	2021	45	100	100	100,00%
5	2022	24	100	100	100,00%
6	2023	25	100	100	100,00%
7	2024	26	100	100	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2024, realisasi KSD setiap tahunnya terealisasi dengan baik dan memuaskan serta senantiasa berhasil mencapai target yang telah ditetapkan melalui penambahan jumlah renaksi setiap tahunnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kota Administrasi Jakarta Barat mendukung dan mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah dengan menyelesaikan target Kegiatan Strategis Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang menjadi dukungan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2024 dengan capaian angka 100 %, antara lain :

1. Kolaboratif unsur Kota Administrasi Jakarta Barat dalam melakukan dukungan, penyelesaian hambatan, dan memberikan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang dalam mewujudkan capaian KSD Tahun 2024.

2. Apresiasi dan dukungan *stakeholder* dalam pelaksanaan penataan wilayah dan pemukiman dengan melakukan diskusi bersama dan mengutamakan kepentingan bersama sehingga pelaksanaan berjalan tepat waktu.
3. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala pada setiap triwulan capaian KSD Tahun 2024 yang terdapat hambatan dan memberikan laporan capaian secara berkala pada pimpinan.

Hal ini menunjukkan bahwa jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat telah berupaya secara maksimal dalam mewujudkan target kinerja Kegiatan Strategis Daerah yang ditetapkan dengan didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit kerja perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Capaian Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional

1. Capaian Sasaran Khusus

Sebagai dukungan pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2024 pada Kepala Perangkat Daerah, indikator Khusus disusun pada Sasaran Khusus tahun 2024. Indikator khusus menjadi bagian dari pengolahan e-kinerja dalam capaian penerimaan TPP pada Kepala Perangkat Daerah. Adapun capaian dan realisasi indikator Khusus Tahun 2024 pada Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai berikut :

Tabel 34. Indikator Khusus Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Keterangan
1	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	100%	100%	Paparan Strategi komunikasi, Editorial Plan, mitigasi krisis dan bahasa komunikasi, dan materi program unggulan yang dipublikasikan melalui berbagai media.
2	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	3,25	3,25	Data terealisasi sesuai target
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	92%	93,6%	Hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat Tahun 2024 mencapai target
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	100%	100%	Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2024 mencapai target.
5	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	80%	91,61%	Realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri telah melebihi target
6	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	100%	100%	Seluruh PNS Kota Administrasi Jakarta Barat (573 orang) telah memenuhi pengembangan kompetensi minimal 40 Jam Pelajaran.
7	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	100%	100%	Materi telah diunggah pada website <i>Knowledge Management</i> BPSDM Provinsi DKI Jakarta.
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	100%	100%	BA Implementasi Manajemen Risiko dan Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Jakarta Barat telah mencapai target
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	71%	90,12%	Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi Kota Administrasi Jakarta Barat telah melebihi target.

Capaian Sasaran Khusus Tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan kesepakatan perjanjian kinerja. Pada pelaksanaan indikator persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat tercapai 100 %. Capaian ini merupakan dukungan dan Kerjasama perangkat daerah pada Kota Administrasi Jakarta Barat termasuk Kelurahan dan Kecamatan dalam memastikan terinformasi program unggulan tersampaikan dengan baik. Pada indikator persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun, seluruh ASN Kota Administrasi Jakarta Barat (573 pegawai) telah memenuhi pengembangan kompetensi minimal 40 Jam Pelajaran. Selain itu, realisasi Manajemen Pengetahuan tercapai sesuai target.

Seluruh pelaksanaan indikator khusus mencapai Persentase pemenuhan target yang telah ditetapkan untuk Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta dengan capaian rata-rata 100 %. Perbandingan Indikator Khusus setiap tahun terinci sebagai berikut :

**Tabel 35. Perbandingan Indikator Khusus
Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024**

No	Indikator Khusus	2021	2022	2023	2024	Capaian	Keterangan
1	Opini laporan Keuangan	100%	100%	100%	-	-	Tercapai
2	e-Order	100%	100%	100%	-	-	Tercapai
3	Strategi Komunikasi	100%	100%	100%	100%	-	Tercapai
4	Predikat SAKIP	93,85	91,66	83,45	-	100,73%	Tercapai
5	Arsip Aktif	-	-	100%	-	100,00%	Tercapai
6	SDI	-	-	100%	3,25	100,00%	Tercapai
7	SKLM	-	-	96,97%	93,6	100,00%	Tercapai
8	BMD	-	-	100%	100%	100,00%	Tercapai
9	BAST	-	-	100%	-	100,00%	Tercapai
10	TKDN	-	-	96,82%	91,61	100,00%	Tercapai
11	Kompetensi ASN	-	-	100%	100%	100,00%	Tercapai
12	Manajemen Pengetahuan	-	-	100%	100%	100,00%	Tercapai
13	Manajemen Risiko	-	-	100%	100%	100,00%	Tercapai
14	Target Kinerja Anggaran	-	-	96,90%	90,12%	100,00%	Tercapai
15	Nilai PMPRB	0	98,64	-	-	-	-i
16	e-Office	0	100%	-	-	-	-
17	e-Perbal	0	100%	-	-	-	-

Capaian sasaran khusus ini merupakan kinerja bersama dalam memberikan capaian realisasi yang baik pada masyarakat dan komitmen melakukan perubahan dalam mendukung Program Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil evaluasi tabel dan capaian, terdapat beberapa hal yang menjadi dukungan pada sasaran khusus Tahun 2024, antara lain:

1. Implementasi Strategi Komunikasi Publik yang disusun secara berkala tersosialisasi dengan baik dengan pemenuhan kebutuhan tepat sasaran pada setiap Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Dukungan seluruh Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat dalam menyediakan data terkait dengan Satu Data Indonesia.

3. Kota Administrasi Jakarta Barat termasuk Kelurahan dan Kecamatan dalam memastikan inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin berjalan dengan optimal.
4. Dukungan dari seluruh pegawai Kota Administrasi Jakarta Barat dalam pengembangan kompetensi 40 jam pelajaran per tahun dan Manajemen Pengetahuan.

Hal ini menunjukkan bahwa jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat telah berupaya secara maksimal dalam mewujudkan target kinerja Sasaran Khusus yang ditetapkan dengan didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit kerja perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat.

2. Capaian Sasaran Operasional

Sebagai dukungan pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2023 pada Kepala Perangkat Daerah terdapat penyusunan Sasaran Operasional yang mendukung pelaksanaan sasaran sebanyak tiga indikator operasional pada tahun 2024, yang terdiri dari tindak lanjut arahan Gubernur, penyelesaian aduan masyarakat, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK. Indikator operasional menjadi bagian dari Pengolahan e-kinerja dalam capaian penerimaan TPP pada Kepala Perangkat Daerah. Adapun capaian dan realisasi indikator Khusus Tahun 2024 pada Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai berikut :

Tabel 36. Indikator Operasional Tahun 2024 Kota Adm Jakarta Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Keterangan
Sasaran Operasional						
1	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubenur	e-Kinerja	100%	100%	Tindak Lanjut Arahan Gubernur ditindak lanjuti
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100%	99,84%	Penyelesaian Aduan Masyarakat melalui aplikasi CRM dengan total aduan 8.746 aduan dan terselesaikan 98,99%
3	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil	e-Kinerja	100%	100%	Pelaksanaan tindak lanjut tercapai setiap triwulan dan terealisasi 100%

Capaian Sasaran Operasional Tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan kesepakatan perjanjian kinerja. Pada pelaksanaan indikator Tindak Lanjut arahan Gubernur telah terselesaikan dan dilaporkan kembali kepada Provinsi DKI Jakarta dengan capaian terselesaikan 100%. Pada Indikator penanganan aduan masyarakat sepanjang Tahun 2024 terdapat 8.746 aduan masyarakat yang ditindak lanjuti dengan capaian terselesaikan 99,84%. Pada indikator Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) telah terselesaikan dengan pelaksanaan capaian 100% pada setiap triwulan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat.

Adapun pelaksanaan indikator operasional mencapai Persentase pemenuhan target yang telah ditetapkan untuk Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta dengan Capaian

rata-rata 100%. Secara terperinci dibandingkan dengan capaian setiap tahun maka pecapaian dapat digambarkan pada tabel :

Tabel 37. Perbandingan Indikator Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024

No	Indikator Khusus	2020	2021	2022	2023	2024	Capaian	Keterangan
1	Arahan Gubernur	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	Terealisasi
2	TL Aduan Masyarakat	99.70%	99.96%	100%	100%	98,99%	98,99%	Terselesaikan
3	TLHP BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	Terselesaikan

Hasil pelaksanaan Indikator Operasional pada pelaksanaan dalam penanganan sepanjang Tahun 2024 menjadi kinerja keras Aparatur Sipil Negara Kota Administrasi Jakarta Barat dalam bergerak cepat, tepat dan akurat dalam penyelesaian permasalahan yang dilaporkan. Berdasarkan hasil evaluasi tabel dan capaian, terdapat beberapa hal yang menjadi dukungan pada sasaran operasional Tahun 2024, antara lain :

1. Penanganan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat dilaksanakan sesuai SOP dan tepat sasaran dengan kualitas baik dan memuaskan.
2. Dukungan stakeholder 4 (empat) Pilar dalam mendukung rencana kinerja serta realisasi di lapangan mencapai hasil kolaboratif yang memuaskan.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam memastikan penyelesaian hambatan dan kendala pelaksanaan capaian sasaran operasional yang dilaksanakan setiap bulan pada Tahun 2024.

Kota Administrasi Jakarta Barat telah berupaya secara maksimal dalam mewujudkan target kinerja Sasaran Operasioal yang ditetapkan dengan didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit kerja perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun beberapa faktor penghambat yang dihadapi, antara lain :

1. Aplikasi CRM memiliki sistem notifikasi untuk memberikan informasi apabila ada laporan masuk. Notifikasi ini seringkali tidak keluar sehingga pengguna tidak mendapatkan informasi adanya laporan yang membuat para pengguna mendapatkan teguran.
2. Aplikasi CRM ditemukan beberapa laporan yang tidak sesuai, seperti laporan yang lokasi nya tidak sesuai dengan titik kordinat pada *maps*. Akibatnya petugas tiba di titik lokasi namun tidak menemukan laporan tersebut yang sesuai dengan bukti foto aduan.
3. Penerapan aplikasi CRM di Provinsi DKI Jakarta melibatkan semua perangkat daerah dalam menindaklanjuti semua aduan di masyarakat. Surat Keputusan Sekda Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas SK Sekda Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Laporan Melalui Aplikasi CRM telah mengatur pihak yang berhak menindaklanjuti sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menindaklanjuti laporan. Namun realita di lapangan masih terdapat alur tindak lanjut laporan yang masih salah disposisi.

Penerapan aplikasi CRM ini bertujuan untuk mendorong masyarakat ikut dalam berpartisipasi dan mengatasi permasalahan yang ada di Jakarta. Maka diperlukan upaya peningkatan pada penerapan aplikasi CRM agar pelayanan publik di Jakarta menjadi lebih baik. Adapun salah satu upaya yang dilakukan Kota Administrasi Jakarta Barat dalam mengatasi hambatan dalam penerapan aplikasi CRM ini adalah mengadakan rapat koordinasi setiap 3 bulan sekali untuk memonitor capaian aduan yang sudah diselesaikan oleh Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Selain itu, akan digencarkan kembali sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pelaporan pengaduan agar sesuai dengan tugas masing-masing SKPD untuk tindak lanjut aduan, serta meminta pemutakhiran aplikasi ke Jakarta Smart City selaku Penanggung Jawab Kanal Aduan dan Aplikasi CRM.

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Kinerja (*performance*) adalah tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa, kualitas barang atau jasa, perbandingan hasil kerja dengan target dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Presentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik dukungan pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2024.

**Tabel 38. Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja
Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				2024		Capaian
			2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	-	-	-	92,33	92,33	95,99	103,96%
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	88,01	88,01	90,62	94,91	94,91	96,18	101,34%
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	-	-	-	89,76	89,76	95,81	106,74%

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Barat terealisasi dengan baik dan mencapai kenaikan bila dibandingkan dengan Tahun 2024. Keberhasilan ini merupakan kebanggaan jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan komitmen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Keberhasilan adalah tingkat prestasi atau hasil nyata yang dihitung secara periodik baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Keberhasilan tercapainya target yang telah

ditetapkan dengan pengukuran yang sesuai serta kriteria yang telah tercapai. Penjelasan analisa sebagai berikut :

- **Faktor Pendukung**

Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam penerapan indikator layanan kegiatan kemasyarakatan membutuhkan manajemen atau tatanan tindakan sebagai langkah-langkah strategik agar target yang diharapkan tersebut tercapai. Dengan demikian manajemen yang baik sebagai pendukung dalam pelaksanaan capaian target sasaran menjadi sangat penting. Manajemen yang baik menjadi dukungan dalam capaian yang baik. Dalam kerangka mencapai suatu keberhasilan, disyaratkan adanya keterampilan manajemen yang sesuai dengan target, sasaran dan tujuan yang diharapkan. Tidak terpenuhinya tiga hal tersebut, dapat dipastikan akan mengakibatkan kegagalan. Keberhasilan yang terjadi dalam kinerja disebabkan:

- 1) Adanya sistem, mekanisme dan prosedur serta persyaratan yang dibangun dalam memberikan pelayanan yang sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam menindaklanjuti setiap warga yang membutuhkan pelayanan.
- 2) Adanya pemahaman masyarakat dalam prosedur permohonan setiap pelayanan di Kantor Kelurahan, sehingga masyarakat mudah dalam mendapatkan pelayanan.
- 3) Cepat tanggapnya pemerintah dalam merespon pengaduan.
- 4) Pemerintah pada saat melakukan penertiban menjalankan sesuai SOP dengan cara humanis.

- 5) Terjalannya komunikasi yang baik antara pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan dalam menyelaraskan pelayanan kepada masyarakat.
- 6) Adanya kolaborasi pada semua *stakeholder* seluruh unsur aparaturnya Kota Administrasi Jakarta Barat..
- 7) Perilaku petugas sopan, ramah, dan berdedikasi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- 8) Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik.
- 9) Semua kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur yang ada, tepat sasaran, cepat, dan akurat.
- 10) Semua pelayanan gratis, bila ada pelayanan berbayar sesuai dengan tabel retribusi.
- 11) Telah dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkala.

- **Faktor Hambatan**

Pada pelaksanaan pencapaian indikator kinerja dalam pelaksanaan capaian terdapat ketidaksesuaian suatu target atau tujuan yang ingin dicapai dengan kendala hambatan yang terjadi pada pelaksanaan pada tahun 2024. Pelaksanaan monitor dan evaluasi memonitor pelaksanaan, memperbaiki capaian kinerja sesuai pencapaian target, meminimalisasi risiko, dan memberikan penyelesaian bila terdapat hambatan yang terjadi. Hambatan yang

terjadi dan dapat teratasi dalam capaian kinerja tahun 2024 disebabkan:

- 1) Penanganan lokasi yang sangat luas dan pengendalian yang berpotensi tidak terukur.
- 2) Laporan menggunakan CRM yang sulit diidentifikasi , pelaporan tidak jelas, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Beberapa warga yang masih menggunakan biro jasa lainnya dan tidak mengurus sendiri secara langsung sehingga terjadi penyampaian informasi yang tidak akurat, seperti pelayanan Gratis menjadi berbayar.
- 4) Kondisi cuaca ekstrem yang mengakibatkan sarana dan prasarana terdampak untuk diperbaiki.
- 5) Perubahan dan pergeseran anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya ditiadakan.
- 6) Realisasi penggunaan anggaran yang belum maksimal sehingga penyerapan tidak sesuai target pada beberapa kelurahan.

- **Langkah-langkah TINDAK LANJUT**

Dalam pelaksanaan pencapaian Indikator strategis perlu dilakukan tindak lanjut dalam penanganan potensi hambatan, Adapun langkah-langkah tindak lanjut yaitu :

- 1) Sumber Daya Manusia yang mumpuni, yang cukup, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki petugas sangat berdampak pada cepatnya waktu penyelesaian pelayanan sesuai SOP.

- 2) Seluruh pelayanan yang diberikan untuk masyarakat bersifat gratis (tidak dipungut bayaran) hal ini sesuai ketentuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak ada pungutan liar.
- 3) Untuk pelayanan pada prinsipnya sudah melakukan prinsip pelayanan prima yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional serta partisipatif.
- 4) Kejelasan tupoksi petugas pelayanan, mengetahui tupoksinya masing-masing dan sudah adanya penetapan.
- 5) Adanya pembinaan kepada petugas secara rutin dan diadakan evaluasi kinerja petugas.
- 6) Dalam melaksanakan pekerjaan petugas pelayanan secara rutin harus dilaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja yang akan menentukan apakah yang bersangkutan akan diperpanjang kontraknya ataupun dihentikan.
- 7) Diterapkan kedisiplinan dan tanggung jawab.
- 8) Sarana prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik.
- 9) Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas segera ditindaklanjuti dengan baik.
- 10) Pada saat kejadian ketertiban umum, dalam tindak lanjutnya harus dilakukan sesuai dengan SOP, dalam penanganannya harus dilakukan beberapa tahap.
- 11) Melakukan supervisi dan evaluasi pada setiap bulan agar penyesuaian tidak berdampak pada target tidak tercapai.

- 12) Pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi secara berkala agar capaian setiap bulan dan akhir tahun dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.
- 13) Perlu ada dukungan perencanaan dan pengawasan bersama secara berkala dan berkelanjutan dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- 14) Penyelenggaraan pertemuan rutin UKPD di bawah koordinasi para asisten secara berkala sehingga memudahkan koordinasi pelaksanaan program kerja dan pemecahan masalah yang terjadi lintas UKPD, tingkatkan peran asistensi kepada UKPD;
- 15) Peningkatan efektivitas rapat-rapat koordinasi antara UKPD yang kegiatannya saling bersinggungan sehingga tercapai output yg maksimal dari kegiatan;

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas penggunaan sumber daya adalah menerangkan bahwa dalam penyelenggaraan perjanjian kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dibutuhkan Analisa Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Capaian Realisasi Anggaran, dukungan stakeholder dan mewujudkan capaian yang diharapkan.

1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Formasi pegawai yang ada di Kota Administrasi Jakarta Barat, pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 39. Tabel Analisis Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024

	Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)				
Jenis Jabatan Struktural:	ABK	Eksisting	Selisih +/-	
Eselon II	3	3	0	
Eselon III	35	34	-1	
Kelompok	0	0	0	
Eselon IV	334	311	-23	
Subkelompok	18	1	0	
Jabatan Pelaksana:				
Satuan Pelaksana	0	0	0	
Teknis Ahli	138	159	21	
Teknis Terampil	359	19	-340	
Administrasi Ahli	0	0	0	
Administrasi Terampil	0	22	22	
Operasional Ahli	0	0	0	
Operasional Terampil	0	0	0	
Pelayanan Ahli	0	0	0	
Pelayanan Terampil	0	4	4	
Mutasi Pegawai	0	0	0	
Pegawai Tugas Belajar	0	0	0	
CPNS	0	0	0	
Jabatan Fungsional:				
Analisis Kebijakan Ahli Madya	5	0	-5	
Perencana Ahli Madya	1	0	-1	
Analisis Hukum Ahli Madya	1	0	-1	
Analisis SDM Ahli Madya	1	0	-1	
Perencana Ahli Muda	1	0	-1	
Pustakawan Ahli Muda	1	0	-1	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	26	0	-26	
Analisis Hukum Ahli Pertama	5	0	-5	
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	1	0	-1	
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	2	0	-2	
Perencana Ahli Pertama	3	0	-3	
Pustakawan Ahli Pertama	1	0	-1	
Arsiparis Ahli Madya	1	0	-1	

	Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Arsiparis Ahli Muda	2	2	0	
Arsiparis Ahli Pertama	10	4	-6	
Pranata SDM Aparatur Penyelia	1	0	-1	
Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	0	-8	
Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	56	0	-56	
Total Pegawai	1.013	573	-440	Permintaan penambahan pegawai ke BKD Prov. DKI

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Tingkat Kota Administrasi Barat melakukan pengukuran efisiensi rincian output program menggunakan rumus sebagai berikut :

1) Efisiensi Rincian Output (RO) :

$$ERO = \frac{\sum_{i=1}^n (AARO_i \times CRO_i) - RARO_i}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

$$-20\% \leq ERO \leq 20\%$$

2) Nilai Efisiensi :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Perhitungan Efisiensi Rincian Output (RO) dan Nilai Efisien, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 40. Perhitungan Efisiensi Rincian Output (RO) dan Nilai Efisiensi

No.	RO	RVRO/TVRO	Alokasi Anggaran KRO (AAKRO)	Realisasi Anggaran KRO (RAKRO)	AAKRO x (RVRO/TVRO)	(AAKRO x (RVRO/TVRO)) - RAKRO	Efisiensi
1	Program Pengelolaan Kecamatan	100,00%	516.906.371.705	508.287.784.384	516.906.371.705	8.618.587.321	3,25%
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100,00%	102.610.953.435	97.954.729.381	102.610.953.435	4.656.224.054	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00%	2.674.412.528	2.503.467.334	2.674.412.528	170.945.194	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	105,32%	402.261.169.552	383.568.089.414	403.207.419.036	19.639.329.622	
5	Program Pengelolaan Kota Administrasi	105,60%	3.216.632.162	3.114.888.980	3.433.320.024	318.431.044	
Total			1.027.669.539.382	995.428.959.493	1.028.832.476.728	33.403.517.235	
Nilai Efisiensi							58,13%

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, nilai efisiensi Rincian Output tingkat KRO adalah sebesar 3,25% dengan Nilai Efisiensi 58,13%.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja adalah tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah dicapai pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses penilaian capaian pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan kepuasan pada masyarakat Jakarta Barat dengan perbandingan hasil kerja dengan target dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Adapun perbandingan dapat diukur dengan capaian kinerja wilayah Kota Administrasi lainnya ataupun sejenis.

Perbandingan capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan sejalan dengan capaian perbandingan lainnya. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja utama yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan" pada Kota Administrasi Jakarta Barat. Pengukuran perbandingan kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk capaian nilai akhir yang dicapai rata-rata pada tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dengan pengumpulan data berjenjang dari Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

Perbandingan capaian IKU pada Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2024 dilakukan perbandingan pada Kota dan Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta pada indikator kepuasan masyarakat. Selain itu, indikator kepuasan masyarakat dibandingkan dengan Kota Tarakan dan Kota Cirebon.

Tabel 41. Perbandingan Nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta						Kota/Kabupaten	
		Jakarta Barat	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu	Tarakan	Cirebon
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	96,18	98,98	97,53	96,80	97,91	95,93	87,78	86,85

Realisasi Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis, Kota Administrasi Jakarta Barat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 1.027.669.539.382,00. Dari total alokasi anggaran dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis, sebesar Rp 366.147.655.582,00 dikelola Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat, sedangkan selebihnya sebesar Rp 661.521.883.800,00 terbagi dalam 8 (delapan) kecamatan dan 56 (lima puluh enam) kelurahan

Target, realisasi, dan capaian dari masing-masing program pendukung sasaran strategis Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2024 sesuai data Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Provinsi DKI Jakarta, terdata sebagai berikut :

**Tabel 42. Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kota Administrasi Jakarta Barat**

No	Program	Indikator Program	Target Keuangan (APBD Perubahan)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	516.906.371.705	508.287.784.384	98,33%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU			
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	102.610.953.435	97.954.729.381	95,46%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	2.674.412.528	2.503.467.334	93,61%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	402.261.169.552	383.568.089.414	95,35%

No	Program	Indikator Program	Target Keuangan (APBD Perubahan)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (Rp)
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	3.216.632.162	3.114.888.980	96,84%
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan			
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat			
Jumlah			1.027.669.539.382	995.428.959.493	96,86%

Realisasi Anggaran pada Kota Administrasi

Jakarta Barat tahun 2024 sesuai data Sistem Informasi Monitoring dan

Evaluasi Provinsi DKI Jakarta, terdata sebagai berikut :

Tabel 43. Realisasi Anggaran pada PD/UKPD Tahun 2024

No.	Nama PD/UKPD	Target APBD Perubahan Tahun 2024	Realisasi	Capaian
1	SETKO ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	366.147.655.582	351.707.796.335	96,06%
2	KECAMATAN KEBON JERUK	1.902.115.810	1.872.682.264	98,45%
3	KELURAHAN SUKABUMI SELATAN	9.021.303.282	8.837.119.087	97,96%
4	KELURAHAN SUKABUMI UTARA	10.417.539.892	10.237.600.309	98,27%
5	KELURAHAN KELAPA DUA	8.201.872.780	8.114.841.362	98,94%
6	KELURAHAN DURI KEPA	13.698.627.118	13.303.161.102	97,11%
7	KELURAHAN KEDOYA UTARA	13.248.882.199	12.748.894.387	96,23%
8	KELURAHAN KEBON JERUK	14.233.131.168	14.057.742.650	98,77%
9	KELURAHAN KEDOYA SELATAN	10.712.561.594	10.586.421.014	98,82%
10	KECAMATAN KEMBANGAN	1.993.943.979	1.936.757.089	97,13%
11	KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN	13.846.454.460	13.496.132.642	97,47%
12	KELURAHAN MERUYA UTARA	15.524.103.581	15.203.963.325	97,94%
13	KELURAHAN MERUYA SELATAN	13.379.543.665	13.052.723.286	97,56%

No.	Nama PD/UKPD	Target APBD Perubahan Tahun 2024	Realisasi	Capaian
14	KELURAHAN SRENGSENG	12.152.654.666	11.946.694.626	98,31%
15	KELURAHAN JOGLO	12.664.388.568	12.475.959.958	98,51%
16	KELURAHAN KEMBANGAN UTARA	13.085.099.778	12.159.067.315	92,92%
17	KECAMATAN CENGKARENG	1.589.294.873	1.456.746.429	91,66%
18	KELURAHAN CENGKARENG BARAT	17.770.208.507	17.396.742.366	97,90%
19	KELURAHAN CENGKARENG TIMUR	18.997.466.687	18.564.011.323	97,72%
20	KELURAHAN KAPUK	16.818.593.977	16.649.422.710	98,99%
21	KELURAHAN DURI KOSAMBI	15.559.801.149	15.175.484.043	97,53%
22	KELURAHAN RAWA BUAYA	16.048.317.627	15.496.368.520	96,56%
23	KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE	12.221.111.804	11.727.730.581	95,96%
24	KECAMATAN KALIDERES	2.158.107.885	1.994.184.814	92,40%
25	KELURAHAN KAMAL	13.001.856.007	12.502.690.377	96,16%
26	KELURAHAN TEGAL ALUR	16.703.380.066	15.889.800.993	95,13%
27	KELURAHAN PEGADUNGAN	16.882.131.281	16.725.045.644	99,07%
28	KELURAHAN KALIDERES	16.761.179.464	16.400.307.087	97,85%
29	KELURAHAN SEMANAN	12.571.685.955	11.921.987.378	94,83%
30	KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN	2.226.262.269	2.155.209.632	96,81%
31	KELURAHAN TOMANG	14.802.166.167	14.087.689.023	95,17%
32	KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA	10.239.407.582	9.783.497.428	95,55%
33	KELURAHAN GROGOL	10.412.112.607	10.057.684.795	96,60%
34	KELURAHAN JELAMBAR	11.383.529.411	11.068.014.758	97,23%
35	KELURAHAN JELAMBAR BARU	11.611.497.579	11.284.090.191	97,18%
36	KELURAHAN WIJAYA KUSUMA	12.664.956.939	12.406.212.643	97,96%
37	KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN	9.911.749.739	9.636.155.550	97,22%
38	KECAMATAN PALMERAH	1.977.708.473	1.896.434.758	95,89%
39	KELURAHAN PALMERAH	15.223.357.186	14.965.446.324	98,31%
40	KELURAHAN KEMANGGISAN	11.679.027.303	11.439.283.418	97,95%

No.	Nama PD/UKPD	Target APBD Perubahan Tahun 2024	Realisasi	Capaian
41	KELURAHAN SLIPI	8.358.689.756	8.177.830.295	97,84%
42	KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA	9.149.541.563	8.825.088.459	96,45%
43	KELURAHAN JATI PULO	11.521.078.644	11.288.497.509	97,98%
44	KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN	8.721.608.981	8.526.179.980	97,76%
45	KECAMATAN TAMBORA	1.934.600.717	1.792.893.394	92,68%
46	KELURAHAN KALI ANYAR	8.322.882.960	8.010.537.811	96,25%
47	KELURAHAN DURI UTARA	8.001.073.083	7.837.827.458	97,96%
48	KELURAHAN TANAH SEREAL	11.521.215.487	11.095.631.518	96,31%
49	KELURAHAN KRENDANG	8.059.875.940	7.935.673.649	98,46%
50	KELURAHAN JEMBATAN BESI	9.568.546.605	9.448.631.239	98,75%
51	KELURAHAN ANGKE	11.590.091.515	11.309.552.376	97,58%
52	KELURAHAN JEMBATAN LIMA	8.640.231.622	8.491.119.781	98,27%
53	KELURAHAN DURI SELATAN	7.419.966.703	7.237.445.349	97,54%
54	KELURAHAN TAMBORA	7.095.149.994	6.879.735.520	96,96%
55	KELURAHAN PEKOJAN	10.444.277.557	10.151.287.367	97,19%
56	KELURAHAN ROA MALAKA	6.776.938.118	6.520.526.120	96,22%
57	KECAMATAN TAMAN SARI	2.020.538.719	1.993.369.917	98,66%
58	KELURAHAN KRUKUT	8.940.421.486	8.794.060.042	98,36%
59	KELURAHAN MAPHAR	9.317.155.497	9.094.819.505	97,61%
60	KELURAHAN TAMAN SARI	8.592.855.654	8.460.021.659	98,45%
61	KELURAHAN TANGKI	7.835.352.439	7.531.403.130	96,12%
62	KELURAHAN MANGGA BESAR	7.115.953.629	6.875.232.192	96,62%
63	KELURAHAN KEAGUNGAN	9.270.655.462	9.156.899.544	98,77%
64	KELURAHAN GLODOK	7.328.181.013	7.107.087.158	96,98%
65	KELURAHAN PINANGSIA	10.677.867.579	10.469.810.985	98,05%
TOTAL		1.027.669.539.382	995.428.959.493	96,86%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat dalam upaya mencapai tujuan dengan mewujudkan sasaran-sasaran strategis melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dalam rencana strategis telah terselenggara dengan baik. Dengan capaian sebesar 96,86%, seluruh indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan telah dapat menghasilkan *outcome* dan *output* yang diharapkan.

Adapun perbandingan target dan realisasi anggaran antara tahun 2019 – tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 44. Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2019 – Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	642.010.113.193	606.254.115.844	94,43%
2020	598.595.368.040	582.297.289.114	97,28%
2021	922.131.601.245	886.543.531.266	96,14%
2022	975.893.809.519	939.785.306.950	96,30%
2023	966.310.761.052	993.885.586.768	97,23%
2024	1.027.669.539.382	995.428.959.493	96,86%

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa capaian kinerja anggaran Kota Administrasi Jakarta Barat mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian agar pencapaian sasaran strategis maupun pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya dapat terselenggara dengan lebih baik.

Adanya sisa realisasi anggaran dan kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaannya memberikan pelajaran penting untuk perbaikan di

masa depan, khususnya dalam perencanaan anggaran perubahan atau pergeseran tahun 2024. Adapun analisis dan rekomendasi terhadap hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya :

1. Kebijakan Pergeseran dan Efisiensi Anggaran

Kendala:

Kebijakan pergeseran dan efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak mendapatkan dukungan anggaran, sehingga menuntut inovasi dari seluruh aparat dan jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat.

Rekomendasi:

- i. Mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memaksimalkan sumber daya yang ada.
 - ii. Mengembangkan program berbasis hasil (outcome-based) dengan prioritas pada kegiatan berdampak tinggi.
 - iii. Mengadakan pelatihan rutin untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan inovasi pegawai dalam menjalankan program meskipun dengan keterbatasan anggaran.
2. Keterlambatan penerbitan SPD menimbulkan ketidakpastian dan keraguan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara Kota Administrasi Jakarta Barat dan unit kerja perangkat daerah.

Rekomendasi:

- i. Membuat *timeline* yang jelas untuk pengajuan dan penerbitan SPD agar prosesnya lebih terstruktur.
- ii. Mengadakan pertemuan berkala untuk menyelaraskan prioritas antar unit kerja.
- iii. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dengan menerapkan sistem digital yang dapat diakses oleh semua unit kerja terkait.
- iv. Kebijakan pergeseran serta efisiensi anggaran yang mengakibatkan sebagian besar kegiatan tidak memperoleh dukungan anggaran menuntut inovasi dan kreatifitas dari seluruh aparat dan jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat dalam mewujudkan kinerja, outcome dan output yang diharapkan.

3. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran

Kendala:

Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran dan fisik belum dilakukan secara optimal, sehingga target realisasi mungkin tidak tercapai sesuai capaian.

Rekomendasi:

- i. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur.

- ii. Membentuk tim pengawas internal yang bertugas memantau pencapaian target setiap bulannya.
- iii. Mengembangkan dashboard monitoring realisasi anggaran berbasis teknologi untuk mempermudah pelacakan capaian anggaran dan fisik.

Prestasi dan Inovasi

Berbagai penilaian ataupun perlombaan baik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat Kota, hingga tingkat Kecamatan mulai kembali marak diselenggarakan pada tahun 2024 ini. Pelaksanaan inovasi keberlanjutan dan kolaborasi dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan mengajak serta para *stakeholders*.

Bersama jajaran menjadi kolaborator setiap aksi kolaborasi pada setiap pelaksanaan kegiatan di seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Berbagai prestasi atau penghargaan yang berhasil diraih Kota Administrasi Jakarta Barat baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Provinsi merupakan salah satu bukti nyata dari upaya yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada level Nasional, Pemerintah Provinsi, dan antar wilayah Kota Administrasi.





BAB 4 Penutup

Kesimpulan

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Pada Tahun 2024, Kota Administrasi Jakarta Barat mencatat capaian kinerja yang sangat baik dengan nilai **104,01%**. Dukungan terhadap pelaksanaan **Kegiatan Strategis Daerah (KSD)** mencakup:

- a) **3 KSD** dan **6 Sub KSD** yang telah terlaksana dengan baik.
- b) Pelaksanaan **26 Rencana Aksi (Renaksi)** yang berhasil mencapai tingkat capaian sebesar **100%**.

Selain itu, terdapat **Sasaran Khusus** dan **Sasaran Operasional** dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024:

- a) **Sasaran Khusus** mencatat capaian rata-rata sebesar **104,8%**, menunjukkan pencapaian yang melampaui target.
- b) **Sasaran Operasional** mencapai rata-rata **99,95%**, mencerminkan konsistensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program di tingkat operasional.

Peningkatan capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang didukung oleh penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kolaborasi ini berhasil menjadikan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai salah satu yang terbaik. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan. Laporan ini juga mengindikasikan tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya, merupakan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kepastian hukum, kesetaraan, efektivitas, dan efisiensi. Prinsip-prinsip tata kelola ini menjadi landasan dalam penerapan kebijakan yang demokratis, yang ditandai dengan penguatan kontrol serta kolaborasi aktif dari masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat.

Saran

Dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat, saran yang dapat disampaikan, antara lain :

1. Penguatan Sistem Perencanaan Berbasis Data, data yang terintegrasi dan terkini dalam proses perencanaan untuk memastikan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas yang lebih inovatif dan adaptif di lingkup Kota Administrasi Jakarta Barat.
3. Penguatan Kolaborasi Antar Stakeholder, Perkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pelaksanaan program pembangunan. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan melalui forum musyawarah yang inklusif. Serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung program sosial dan pembangunan infrastruktur.
4. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Target, pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program untuk memastikan kinerja sesuai dengan target.
5. Responsif terhadap Perubahan Lingkungan Strategis, responsif terhadap perubahan lingkungan strategis dengan mengantisipasi tren dan tantangan yang berkembang, seperti urbanisasi dan digitalisasi.
6. Pengelolaan Anggaran yang Efisien, optimalisasi penggunaan anggaran dengan fokus pada kegiatan prioritas dan berdampak langsung pada masyarakat. Melakukan review anggaran secara berkala untuk mengidentifikasi potensi efisiensi.



LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uus Kuswanto
Jabatan : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Heru Budi Hartono
Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024

Pihak Kedua, Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  Heru Budi Hartono	Pihak Kesatu, Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,  Uus Kuswanto NIP 197301211993031004
--	--

LKIP Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Uus Kuswanto
NIP : 197301211993031004
Jabatan : Walikota
Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Barat

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil Indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	92,33	N/A	92,33	92,33	Nilai
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil Indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	92,33	N/A	92,33	92,33	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM) Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan tentang penilaian perspsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,05, atau nilai interval konversi 55,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM) Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.	N/A	94,905	N/A	94,905	94,905	Nilai
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Metode Pengukuran : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei	N/A	89,755	N/A	89,755	89,755	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Khusus										
3	Terimplementasinya rencana strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	a-Kinerja	Definisi : a. Persentase lensaunya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran : a. Bobot 35% PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30% PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20% PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15% PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persen
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu : a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] / (Rentang nilai kualitas data SDI 0-4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik b. Survei Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah Definisi : Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Survei Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing Metode Pengukuran : Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jakasurvei	92	N/A	92	N/A	92	Nilai
6	Tertelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Definisi : Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Perlakuan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Perlakuan dan Mesin dilaksanakan oleh PDUKPD dan UPB Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi : a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam lembar kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPT, dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persen
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyekekan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan penyelesaian yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declared) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Perlakuan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya	N/A	30	N/A	80	80	Persen

LKIP Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan. Sumber Data : a. Bghor LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3ON Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD						
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi : Tersesatkannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat.bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)] Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PIRTA BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Tersesatkannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4). Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Pengurangan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/level Risiko Laporan pemantauan diunggah pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektori) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100% Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV Metode Pengukuran: Tersesatnya dokumen-dokumen implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektori : Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV	N/A	50	N/A	100	100	Persen
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat di antaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e-SAKIP 2) Penerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyekti APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2024

LKIP Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Sumber Data : a) data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-skip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan menghubungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bokk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bokk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 50 = Rendah > 50 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik						
Sasaran Operasional										
12	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100 %	100	100	100	100	100	Persen
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
14	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan selanjutnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektoral)	25	25	25	25	100	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Jakarta, 1 Januari 2024
Wakil Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi DKI Jakarta,

Lius Kuswanto
NIP. 197301211960031004

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat Sebagai Kota Inovatif, lestari dan berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	92,33	RA1. Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	KK1.1. Tersusunnya Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	T/O1.1.1. Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	TW 2
				RA2. Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	KK2.1. Tersusunnya Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	T/O2.1.1. Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	TW 4
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	94,905	RA1. Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dan Persiapan SKM Semester 1 Tahun 2024	KK1.1. Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dan Persiapan SKM Semester 1 Tahun 2024	T/O1.1.1. Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dan Persiapan SKM Semester 1 Tahun 2024	TW 1
				RA2. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi semester 1 Tahun 2024	KK2.1. Tersusunnya Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	T/O2.1.1. Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	TW 2
				RA3. Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024 dan Persiapan SKM Semester 2 Tahun 2024	KK3.1. Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Semester 1 dan Persiapan SKM Semester 2 Tahun 2024	T/O3.1.1. Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Semester 1 dan Persiapan SKM Semester 2 Tahun 2024	TW 3
				RA4. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi semester 2 Tahun 2024	KK4.1. Tersusunnya Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	T/O4.1.1. Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	TW 4
				RA5. Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	KK5.1. Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	T/O5.1.1. Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	TW 4
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	89,755	RA1. Pelaksanaan Evaluasi Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun 2023	KK1.1. Terlaksananya Evaluasi Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun 2023	T/O1.1.1. Nota Dinas atau Laporan Hasil Survey Tahun 2023	TW 1
				RA2. Pelaksanaan Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 dan Tindak Lanjut Hasil Survey Tahun 2023	KK2.1. Terlaksananya Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tindak Lanjut Hasil Survey Tahun 2023	T/O2.1.1. Nota Dinas atau Laporan Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023	TW 2

1

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
				RA3. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	KK3.1. Tersusunnya Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	T/O3.1.1. Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	TW 2
				RA4. Pelaksanaan Evaluasi Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	KK4.1. Terlaksananya Evaluasi Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	T/O4.1.1. Nota Dinas atau Laporan Hasil Survey Semester 1 Tahun 2024	TW 3
				RA5. Pelaksanaan Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 dan Tindak Lanjut Hasil Survey Semester 1 Tahun 2024	KK5.1. Terlaksananya Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024 dan Tindak Lanjut Hasil Survey Semester 1 Tahun 2024	T/O5.1.1. Nota Dinas atau Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Survey Semester 1 Tahun 2024	TW 4
				RA6. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	KK6.1. Tersusunnya Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	T/O6.1.1. Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	TW 4

Jakarta, 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

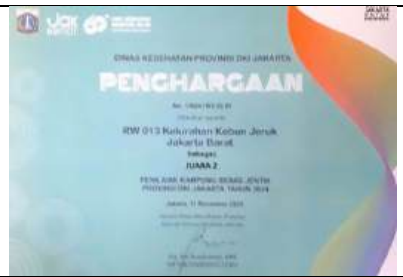


Heni Budi Hartono



Uus Kuswanto
NIP. 19730121196031004

**PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DIRAIH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2024**

Unit Kerja Terkait	Prestasi		Tingkat	Unit/Organisasi Yang Mengeluarkan Penghargaan	Dokumentasi
Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	Kabupaten/Kota dengan Cakupan Imunisasi Rutin Tertinggi Kedua Tahun 2023 dan TW I Tahun 2024	Nasional	Kementerian Kesehatan RI	
	2	Juara I Kampung Tuberkulosis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (RW 09 Kelurahan Jelambar Baru)	Provinsi	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	
	3	Juara Umum Gebyar RPTRA	Provinsi	TP PKK Provinsi DKI Jakarta	
	4	Juara II Lomba Kinerja RPTRA Dalam Acara Gebyar RPTRA Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Provinsi	TP PKK Provinsi DKI Jakarta	
	5	Juara II Penilaian Kampung Bebas Jentik Provinsi DKI Jakarta	Provinsi	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	

Unit Kerja Terkait	Prestasi		Tingkat	Unit/Organisasi Yang Mengeluarkan Penghargaan	Dokumentasi
	6	Juara II Dalam Inisiatif Pembentukan Kampung Bebas Rokok Provinsi DKI Jakarta	Provinsi	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	
	7	Juara III Lomba Bulutangkis Beregu Campuran Piala Pj Gubernur	Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	
Bagian Hukum	1	Piagam Penghargaan Peningkatan Kinerja Pengelolaan JDIH Terbaik di Zona Wilayah Barat Indonesia Tingkat Kota	Nasional	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	
	2	Piagam Penghargaan Peningkatan Kinerja Pengelolaan JDIH Terbaik di Zona Wilayah Barat Indonesia Tingkat Kota	Nasional	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	
	3	Piagam Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia	Nasional	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	

Unit Kerja Terkait	Prestasi		Tingkat	Unit/Organisasi Yang Mengeluarkan Penghargaan	Dokumentasi
Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1	Adipura Penghargaan Presiden Republik Indonesia Untuk Kategori Kota Metropolitan	Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia	
	2	Penghargaan Stan Desain Terbaik Dalam Pameran Flora dan Fauna Jakarta 2024	Provinsi	Gubernur Provinsi DKI Jakarta	
	3	Sertifikat Proklamasi Kategori Utama	Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia	
	4	Sekolah Adiwiyata Mandiri 2024 (SDN Sukabumi Selatan 07)	Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia	
	5	Sekolah Adiwiyata Mandiri 2024 (SDN Kedoya Utara 09)	Provinsi	Pj. Gubernur DKI Jakarta	
Bagian Kepegawaian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	1	Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik)	Nasional	Ombudsman RI	

Unit Kerja Terkait	Prestasi		Tingkat	Unit/Organisasi Yang Mengeluarkan Penghargaan	Dokumentasi
Bagian Umum dan Protokol	1	Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 "Informatif"	Provinsi	Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	 
Bagian Perekonomian	1	Peringkat II Apresiasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 kategori Kota/Kab Adm.	Provinsi	Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta	
Kecamatan Cengkareng	1	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Kecamatan	Provinsi	Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	
Kecamatan Taman Sari	1	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Kecamatan	Provinsi	Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	
Kelurahan Jelambar	1	Penghargaan dalam Inisiatif Pembentukan Kampung Bebas Rokok (Juara 1)	Provinsi	Dinas Kesehatan	

Unit Kerja Terkait	Prestasi		Tingkat	Unit/Organisasi Yang Mengeluarkan Penghargaan	Dokumentasi
Kelurahan Tanjung Duren	1	Kelurahan dengan Penataan Kawasan Terbaik	Provinsi DKI Jakarta	Pj. Gubernur DKI Jakarta	
	2	Penghargaan dalam Inisiatif Pembentukan Kampung Bebas Rokok	Provinsi	Dinas Kesehatan	
Kelurahan Pekojan	1	Juara 1 RW Terbaik Tertib Administrasi Kependudukan	Provinsi	Pj. Gubernur DKI Jakarta	
	2	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Kategori Kelurahan	Provinsi	Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	
Kelurahan Tambora	1	Juara 2 RT Terbaik Tertib Administrasi Kependudukan	Provinsi	Pj. Gubernur DKI Jakarta	
Kelurahan Tanah Sereal	1	Juara III Lomba GKSTTB (Gerakan Keluarga Sehat Tanggap & Tangguh Bencana)	Provinsi	TP. PKK Tingkat Pusat	

Unit Kerja Terkait	Prestasi		Tingkat	Unit/Organisasi Yang Mengeluarkan Penghargaan	Dokumentasi
Kelurahan Krukut	1	Program Desa/Kelurahan Pangan Aman Prov. DKI Jakarta	Nasional	Badan POM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan)	
Kelurahan Kelapa Dua	1	Juara 1 RT Terbaik Tertib Administrasi Kependudukan	Provinsi	Pj. Gubernur DKI Jakarta	
	2	Juara 2 RW Terbaik Tertib Administrasi Kependudukan	Provinsi	Pj. Gubernur DKI Jakarta	
Kelurahan Jati Pulo	1	Program Desa/Kelurahan Pangan Aman Prov. DKI Jakarta	Nasional	Badan POM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan)	
Kelurahan Kalideres	1	Juara 1 Lomba Majelis Ta'lim	Provinsi	Forum Komunikasi Majelis Ta'lim (FKMT) Provinsi DKI Jakarta	
	2	Juara 2 Lomba Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan	Provinsi	Pj. Gubernur DKI Jakarta	
Kelurahan Kedaung Kali Angke	1	Kelurahan Dengan Penataan Kawasan Terbaik di Provinsi DKI Jakarta	Provinsi	Pj. Gubernur DKI Jakarta	

**DAFTAR INOVASI DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2024**

No	UKPD	Inovasi	Tahun Inovasi
1	Kelurahan Jelambar Baru	Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Penyediaan Data yang Terintegrasi di Kelurahan Jelambar Baru	2024
2	Kelurahan Tomang	POSYANTEK	2024
3	Kelurahan Tangki	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memilah Sampah Melalui Program Pilah Sampahmu Pilih Sembakomu di Kelurahan Tangki	2024
4	Kelurahan Palmerah	Optimalisasi Pengelolaan Pencatatan Cuti Bagi anggota PPSU dengan menggunakan Sistem Untuk Cuti (SUCI) di Kelurahan Palmerah	2024
5	Kelurahan Wijaya Kusuma	Peningkatan Pelayanan Pengangkutan Sampah Anorganik dengan Aplikasi Jemput Sampah di Kelurahan Wijaya Kusuma Kota Administrasi Jakarta Barat	2024
6	Kelurahan Duri Utara	Peningkatan Persentase Pengurusan Surat Pernyataan Ahli Waris yang Terintegrasi Dengan Akta Kematian melalui Jakevo di Kelurahan Duri Utara Kota Administrasi Jakarta Barat	2024

